

Katalog: 9302020.32
ISSN 2655-0350

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI

JAWA BARAT

MENURUT PENGELUARAN

2021–2025

Volume 29, 2026



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI

JAWA BARAT

MENURUT PENGELUARAN

2021–2025

Volume 29, 2026

<https://jabar.bps.go.id>



Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2021-2025

Volume 29, 2026

Katalog: 9302020.32

ISSN 2655-0350

Nomor Publikasi: 32000.26011

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xvi + 94 halaman

Penyusun Naskah:

BPS Provinsi Jawa Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Jawa Barat

Pembuat Kover:

BPS Provinsi Jawa Barat

Penerbit:

©BPS Provinsi Jawa Barat

Sumber Ilustrasi:

Humas BPS Provinsi Jawa Barat

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Pengeluaran, 2021–2025**
Volume 29, 2026

Pengarah:

Dr. Margaretha Ari Anggorowati, S.Kom, M.T

Penanggung Jawab:

Yuni Anggorowati, S.ST., M.A.P.

Penyunting:

Siswanita U., S.Si., M.T. • Hani Annisa Nauli Harahap, SST.
Resty Apriani, S.Ikom • Evi Octaviany., S.ST., M.Stat
Muhamad Rikiansyah, S.Ikom

Penulis Naskah:

Siswanita U., S.Si., M.T. • Ria Yunita Emkaen, S.Si., M.E.
Ahmad Syamsul Bahri, S.A.P. • Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Siswanita U., S.Si., M.T. • Ria Yunita Emkaen, S.Si., M.E.
Ahmad Syamsul Bahri, S.A.P. • Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat.

Desain Kover dan Templat:

Riana Safaat, S.Si, M.E.

Penata Letak:

Riana Safaat, S.Si, M.E.

Kata Pengantar

PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini, penghitungan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sisi produksi (*production*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan produksi menjelaskan agregat PDRB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha. Sedangkan pendekatan pengeluaran menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi akhir dan investasi riil.

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2021–2025” ini menyajikan data dan informasi PDRB dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2021–2025 atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dan sudah disesuaikan dengan *System of National Account 2008 (SNA 2008)* yang di rekomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga memberikan banyak manfaat bagi semua pengguna. Saran dan tanggapan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik pada edisi yang akan datang.

Bandung, April 2026
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat

Dr. Margaretha Ari Anggorowati, S.Kom, M.T



Daftar Isi

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Pengeluaran, 2021–2025
Volume 29, 2026

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga	11
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
2.5 Perubahan Inventori	17
2.6 Ekspor dan Impor	20
3. TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2021–2025	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran	25
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	39
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	41
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	49
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	52
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	54
4. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021–2025	59
4.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran 2021–2025	60
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	62
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	64
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	65
4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	67
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor	68

	Halaman
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	70
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	71
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI).....	73
5. PENUTUP.....	79
6. DAFTAR PUSTAKA.....	83
7. LAMPIRAN.....	87

<https://jabar.bps.go.id>

Daftar Tabel

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat

Menurut Pengeluaran, 2021–2025

Volume 29, 2026

	Halaman
Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025	26
Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025	27
Tabel 3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	29
Tabel 4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	31
Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	32
Tabel 6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	33
Tabel 7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	35
Tabel 8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	36
Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	38
Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	39
Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	43
Tabel 12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	45
Tabel 13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	48
Tabel 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	50
Tabel 15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	53
Tabel 16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	54
Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	60

	Halaman
Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2021–2025	63
Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2021–2025.....	65
Tabel 20 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2021–2025.....	66
Tabel 21 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	68
Tabel 22 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2021–2025.....	69
Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2021–2025.....	70
Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025.....	72
Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	74

<https://jabar.bps.go.id>

Daftar Gambar

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Pengeluaran, 2021–2025
Volume 29, 2026

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (triliun rupiah), 2021–2025.	28
Gambar 2	Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	73

<https://jabar.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat

Menurut Pengeluaran, 2021–2025

Volume 29, 2026

	Halaman
Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025.....	87
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025	88
Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	89
Lampiran 4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025.....	90
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	91
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025.....	92
Lampiran 7 Perkembangan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2021–2025	93
Lampiran 8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama periode 2021–2025, perekonomian Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren pemulihan yang kuat dan berkelanjutan pascapandemi Covid-19. Tahun 2021 menjadi fase awal pemulihan ekonomi, ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ke level positif seiring pelonggaran pembatasan sosial, membaiknya iklim usaha, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun demikian, laju pertumbuhan pada periode ini masih berada di bawah level prapandemi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi semakin menguat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi yang solid, serta kinerja ekspor yang membaik. Aktivitas sosial yang kembali normal dan ekonomi turut memperkuat permintaan domestik dan mendorong akselerasi pemulihan.

Memasuki tahun 2023, stabilitas inflasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat semakin menopang pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian, didukung oleh daya beli yang terjaga. Selain itu, dinamika politik menjelang Pemilu 2024 memberikan stimulus tambahan, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Tahun 2024 sebagai tahun penyelenggaraan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah, memberikan dorongan lanjutan terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja politik, konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah.

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Barat memasuki fase konsolidasi pascatahun politik dengan pertumbuhan yang tetap positif. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen utama menunjukkan kinerja yang baik. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai kontributor terbesar PDRB tetap tumbuh positif, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga. Konsumsi LNPR dan Konsumsi Pemerintah juga meningkat, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengindikasikan keberlanjutan investasi. Kinerja ekspor menunjukkan tren positif seiring meningkatnya permintaan global. Adapun komponen yang mengalami kontraksi hanya terjadi pada perubahan inventori.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Jawa Barat selama periode 2021–2025 tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai pilar utama pertumbuhan. Di tengah dinamika harga dan ketidakpastian global, prospek ekonomi Jawa Barat tetap optimistis, didukung penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, transformasi digital, serta potensi pasar dan tenaga kerja yang besar. Dengan fondasi tersebut, Jawa Barat kian memperkuat perannya sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

PENDAHULUAN

BAB

1

<https://jabar.bps.go.id>

1.1 Pengertian Pendapatan Regional

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran moneter nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu. PDRB nominal bisa menggambarkan ekonomi suatu wilayah dan bisa dibandingkan secara nasional di pasar internasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisikan PDB/PDRB sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai kotor yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi dan jasa (ditambah pajak dikurangi subsidi). Dengan demikian PDB/PDRB adalah alat untuk mengukur nilai moneter akhir barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna akhir dan diproduksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan SNA 2008, pengertian PDB/PDRB merupakan konsep nilai tambah yang diperoleh dari selisih antara *output* dengan konsumsi antara yaitu jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produsen residen ditambah pajak atas produk kurang subsidi atas produk yang tidak termasuk di dalam penilaian *output*. Di sisi lain, konsep PDB/PDRB merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi nilai impor barang dan jasa. Dengan demikian PDB/PDRB merupakan jumlah pendapatan primer yang didistribusikan oleh unit produsen residen.

Produk Domestik Neto (PDN/PDRN) diperoleh dengan mengurangi PDB/PDRB dengan konsumsi barang modal tetap. Namun ukuran bruto (*gross*) dari produk dan pendapatan akan digunakan dengan berbagai alasan. Penyusutan aset tetap seperti yang dihitung pada akuntansi bisnis, secara umum tidak memenuhi syarat SNA. Penghitungan konsumsi barang modal tetap membutuhkan statistik dalam mengestimasi nilai stok aset tetap, usia berbagai jenis aset, pola penyusutan dan lain-lain. Tidak seluruh negara/wilayah menyusun penghitungan seperti itu, dan bila mereka melakukan mungkin berbeda metodologi (dengan menggunakan data bisnis meskipun kurang tepat). Akibatnya nilai bruto lebih sering muncul atau tersedia lebih dulu, dan secara umum lebih dapat diperbandingkan antar negara. Sehingga PDB/PDRB secara luas digunakan, meskipun menurut konsep dasar ekonomi manfaatnya lebih rendah dari PDN/PDRN. PDN/PDRN juga harus dihitung dengan mengembangkan estimasi konsumsi barang modal tetap agar dapat menjadi alat yang bermakna dalam berbagai jenis analisis.

Pendapatan primer yang tercipta dari aktivitas produksi oleh unit produsen residen, sebagian besar didistribusikan ke unit institusi residen lainnya; sedangkan sebagian lagi dapat didistribusikan ke unit nonresiden. Demikian halnya beberapa pendapatan primer yang tercipta di luar negeri, mungkin berasal dari unit residen. Hal itu mengarah pada pendefinisian dan pengukuran Pendapatan Nasional/Regional Bruto (PNB/PRB). PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pendapatan primer yang dibayar ke unit nonresiden, ditambah dengan pendapatan primer yang

diterima dari unit nonresiden. Dengan kata lain, PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pajak (kurang subsidi) atas produksi dan impor, kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan kepemilikan yang dibayarkan ke luar negeri; ditambah pendapatan kepemilikan yang diterima dari luar negeri. Dengan demikian, PNB adalah jumlah pendapatan primer bruto yang diterima oleh unit institusi residen atau sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui pendapatan regional. Pendapatan regional adalah Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh residen yang tinggal di suatu daerah pada periode tertentu (www.bps.go.id). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta perubahan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15) Jasa Pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri atas: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan data PDRB. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://jabar.bps.go.id>

BAB

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 2

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;
2. Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter;
3. Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja; dan
4. Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Sementara itu, konsumsi akhir rumah tangga tidak mencakup:

1. Pengeluaran untuk mengadakan aset tetap dan barang-barang berharga;
2. Pengeluaran untuk Usaha Rumah Tangga (URT);
3. Perbaikan besar tempat tinggal, seperti rekonstruksi, renovasi, dan sebagainya;
4. Pembayaran pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
5. Pembayaran kredit, premi asuransi, dan dana pensiun; serta
6. Barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja untuk kegiatan operasional usaha dan bukan bagian dari kompensasi tenaga kerja.

PKRT dicatat secara *actual basis*. Konsumsi barang dicatat pada saat terjadi perubahan kepemilikan, sedangkan konsumsi jasa dicatat setelah jasa disalurkan dan dinikmati oleh rumah tangga. PKRT dinilai dengan harga pembeli, termasuk pajak atas produk, dan biaya pengiriman.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besaran PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah- langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun.
 - Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun.
- b. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
- c. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu : organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai *output* non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai *output* non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

1. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll;
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya;
3. Penyusutan;
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil updating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil updating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.
- b. Mengestimasi PK-LNPRT dengan mengalikan rata-rata pengeluaran LNPRT menurut jenis lembaga dengan populasinya. Hasil penghitungan tersebut akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan

(ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) provinsi mencakup:

1. PK-Pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi;
2. PK-Pemerintah provinsi yang bersangkutan;
3. PK-Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi;
4. PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P provinsi tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN tahunan (Kemenkeu);
- b. Data realisasi APBD tahunan (Kemenkeu);
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS);
- d. Output Bank Indonesia (BI);
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADH Berlaku

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADH Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” berarti bahwa di dalamnya masih mengandung penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri dari BPS provinsi/kabupaten/kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan nonmigas).

- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. PMTB dalam bentuk bangunan, dihitung dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai *output* industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi *output* mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai *inflator*). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia, dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BPH Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstan diperoleh dengan cara men-deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan *output* industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar;
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih; dan
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga

penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah sebagai berikut:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Ekspor dan Impor

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari :

1. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut;
2. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut; Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

3. Net ekspor antar daerah:
 - a. Ekspor antar daerah
 - b. Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

**TINJAUAN
PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN
TAHUN 2021–2025**

BAB

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT 3 BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2021–2025

Jawa Barat adalah salah satu penopang perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 12–13 persen setiap tahunnya terhadap perekonomian nasional. Hal itu menyebabkan dinamika yang terjadi pada perekonomian Jawa Barat akan sangat memengaruhi perekonomian nasional. Pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, kebijakan pemerintah yang melonggarkan aktivitas masyarakat mulai tahun 2021 menunjukkan pengaruh yang sangat berarti. Geliat pergerakan ekonomi kembali menguat yang ditunjukkan oleh berbagai indikator makro, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama periode 2021–2025 perekonomian Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan. Aktivitas industri manufaktur sebagai penopang utama perekonomian Jawa Barat berangsur normal, menyebabkan daya beli masyarakat perlahan pulih dan memberikan dorongan yang kuat pada perputaran ekonomi. Aktivitas investasi fisik yang menunjang peningkatan kapasitas produksi pun memperlihatkan peningkatan yang signifikan, begitu pula dengan aktivitas ekspor, baik ekspor ke luar negeri maupun ke provinsi lain.

Selain menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, peningkatan perekonomian di Jawa Barat juga menunjukkan angka yang lebih masif dibanding wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran

Pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 makin terlihat nyata, tercermin dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 yang terus meningkat pada periode tahun 2021–2025. Selain nilai agregat, tren peningkatan juga terjadi pada semua komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran.

PDRB menurut pengeluaran merupakan agregat beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor. Komponen utama penopang PDRB Jawa Barat adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Konsumsi akhir oleh rumah tangga atau Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) seringkali menjadi tolok ukur kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. PKRT juga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) memberikan gambaran peran pemerintah dalam perekonomian, sesuai fungsinya sebagai penyedia pelayanan kolektif maupun pelayanan individu. Seluruh belanja yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan nilai PKP. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan perubahan inventori menggambarkan

bagaimana pertambahan kekuatan perekonomian Jawa Barat, berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Peningkatan nilai nominal PDRB ADHB dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Tabel 1 di bawah ini menyajikan perkembangan PDRB ADHB menurut komponen dari tahun 2021 hingga 2025. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Jawa Barat tercatat mencapai 2.204,66 triliun rupiah pada tahun 2021 yang terus meningkat menjadi sebesar 3.038,67 triliun rupiah di tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa di pasar nasional dan internasional.

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
2 Konsumsi LNPRT	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01	20.454,88
3 Konsumsi Pemerintah	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.593,75	145.833,63
4 PMTB	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
5 Perubahan Inventori	-15.151,20	2.492,32	2.061,05	1.423,05	483,55
6 Ekspor	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.122,26	1.713.849,73	1.808.954,71
7 Dikurangi Impor	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.154,15	1.610.331,45	1.670.850,32
Total PDRB	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2025 dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah dampak inflasi (kenaikan harga barang dan jasa). Kenaikan barang dan jasa adalah efek dari ketidakseimbangan antara penyediaan dengan permintaan. Situasi geopolitik dunia sangat memengaruhi harga bahan bakar global, yang berdampak pada peningkatan harga kargo dan transportasi internasional. Begitu pula perubahan kebijakan terkait perdagangan antar negara akan sangat berpengaruh pada harga barang dan jasa yang diperdagangkan, yang pada gilirannya memengaruhi nilai PDRB yang tercipta. Segala perubahan terkait penyediaan dan permintaan atas barang dan jasa tersebut tentu menimbulkan dampak pada perekonomian Jawa Barat, yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap situasi perdagangan global. Ekonomi Jawa Barat masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang bahan bakunya masih bergantung pada penyediaan dari luar negeri. Lebih dari 80 persen impor luar negeri Jawa Barat adalah berupa bahan baku dan penolong, dan sekitar 10 persennya berupa barang modal. Posisi Jawa Barat di dalam perdagangan global juga tergambar dalam realisasi investasi Jawa Barat sebagai lokasi strategis Penanaman Modal Asing (PMA) dan industri yang berorientasi ekspor.

Jika seluruh barang dan jasa yang digunakan pada suatu periode dinilai dengan harga yang berlaku pada dasar yakni tahun 2010, maka nilai PDRB di masing-masing tahun memberikan gambaran perubahan PDRB secara volume/kuantitas (tanpa pengaruh perubahan harga). Oleh karena itu, komponen PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan dapat menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan perubahan volume konsumsi akhir.

Perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu 2021–2025 ditunjukkan oleh Tabel 2. Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Di awal periode yakni tahun 2021, nilai PDRB atas dasar harga konstan Jawa Barat tercatat sebesar 1.507,75 triliun rupiah dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 1.845.32 triliun rupiah di tahun 2025. Kenaikan nilai konstan terjadi pada hampir semua komponen PDRB pengeluaran, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor-impor.

Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021–2025

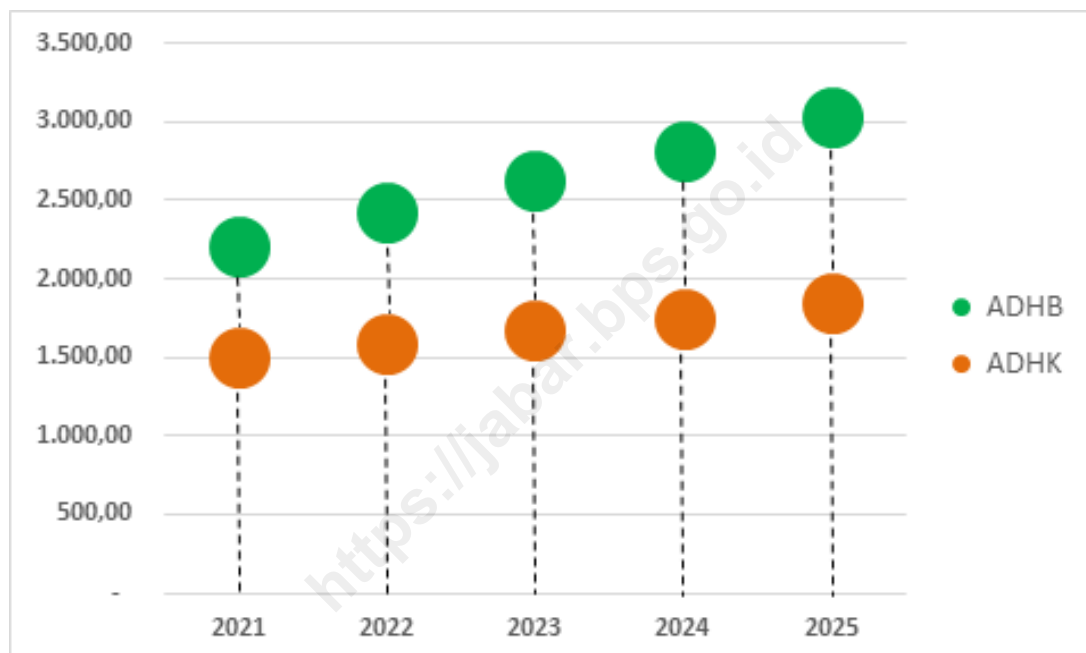
Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	905.974,62	948.326,48	998.976,60	1.048.976,70	1.101.044,65
2 Konsumsi LNPR	9.144,60	9.430,85	10.752,89	11.601,21	12.203,69
3 Konsumsi Pemerintah	73.136,39	71.969,80	76.081,30	77.136,19	80.548,60
4 PMTB	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87	435.547,55
5 Perubahan Inventori	-8.456,84	1.390,51	1.117,33	750,32	244,45
6 Ekspor	681.316,21	756.452,62	850.474,86	953.477,44	976.824,05
7 Dikurangi Impor	511.346,46	556.591,43	654.748,40	753.479,53	761.096,26
Total PDRB	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.406,36	1.752.124,20	1.845.316,74

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2025 pengeluaran konsumsi rumah tangga Jawa Barat mencapai 1.101,04 triliun rupiah dan menjadi penopang utama penciptaan nilai PDRB dari sisi pengeluaran. Pengeluaran konsumsi LNPR dan konsumsi pemerintah masing-masing menyentuh 12,20 triliun rupiah dan 80,55 triliun rupiah. Investasi fisik di Jawa Barat tahun 2025 yang tergambar pada nilai PMTB mencapai 435,55 triliun rupiah. Komponen ekspor dan impor yang merupakan transaksi antara Jawa Barat dengan luar negeri dan dengan provinsi lain juga menunjukkan peningkatan nilai di tahun 2025. Nilai ekspor barang dan jasa Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat mencapai 976,82 triliun rupiah, sedangkan nilai impor Jawa Barat di tahun yang sama sedikit lebih rendah, yakni senilai 761,10 triliun rupiah, sehingga ekspor neto Jawa Barat bernilai positif atau mengalami surplus. Dari sisi inventori, perubahan inventori di Jawa Barat tahun 2025 masih bernilai positif (244,45 miliar rupiah), lebih rendah jika dibandingkan dengan perubahan inventori pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perputaran ekonomi Jawa Barat yang cukup tinggi di tahun 2025, dimana barang yang diproduksi tidak mengalami penumpukan.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Perubahan harga antarwaktu tersebut ditiadakan dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan karena mengacu pada harga pada tahun 2010. Oleh karena itu, selisih nilai antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai perubahan harga. Gambar 1 berikut ini memperlihatkan perbedaan kedua pendekatan penghitungan PDRB tersebut secara lebih jelas. Pada Gambar 1 terlihat bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antartahun lebih curam dibanding yang terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan. Hal itu adalah karena perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga barang dan jasa, sedangkan nilai PDRB atas harga konstan hanya dipengaruhi oleh perubahan volume barang dan jasa.



Gambar 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (triliun rupiah), 2021–2025

Berikutnya, analisis PDRB menurut pengeluaran dapat dilakukan dengan memperhatikan peranan setiap komponen dalam membentuk nilai PDRB secara total setiap tahunnya. Tabel 3 menyajikan distribusi persentase setiap komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku. Secara konsisten, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Jawa Barat dari sisi pengeluaran, dengan peranan berkisar antara 64–65 persen selama periode 2021–2025. Dominasi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 65,99 persen dan terendah pada tahun 2021 yaitu sekitar 64,62 persen. Pada tahun 2025, peranan konsumsi rumah tangga Jawa Barat terhadap pembentukan PDRB adalah sekitar 65,51 persen atau sedikit lebih rendah dari pada peranan di tahun 2024.

Komponen dengan peranan yang signifikan selanjutnya adalah PMTB yang menyumbang hampir seperempat dari nilai PDRB Jawa Barat setiap tahunnya. Distribusi persentase komponen PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang tercatat sekitar 24,73 persen dan yang terendah adalah pada tahun 2022 yakni sekitar 23,81 persen. Peranan komponen PMTB terhadap pembentukan nilai PMTB Jawa Barat tahun 2025 adalah sekitar 24,46 persen atau lebih rendah dari peranan di tahun 2024 yang sekitar 24,70 persen.

Komponen pengeluaran berikutnya yang memiliki peranan besar dalam pembentukan nilai PDRB Jawa Barat adalah ekspor barang dan jasa. Peranan komponen ekspor Jawa Barat di dalam PDRB berkisar antara 50–60 persen selama periode 2021–2025. Peranan ekspor tertinggi adalah di tahun 2024 yakni sebesar 60,70 persen, sedangkan yang terendah pada tahun 2021 yang sebesar 50,94 persen. Sedangkan di tahun 2025, peranan komponen sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yakni sebesar 59,53 persen. Komponen ekspor sering dikaitkan dengan komponen impor karena merupakan transaksi antara residen di wilayah domestik dengan non residen di wilayah lain. Peranan komponen impor di dalam PDRB berkebalikan dengan peranan ekspor. Aktivitas ekspor menjadi penambah dalam penghitungan nilai PDRB, sedangkan aktivitas impor menjadi pengurang dalam penghitungan nilai PDRB, atau dengan kata lain peranan impor di dalam PDRB adalah peranan negatif. Dalam rentang 2021–2025, nilai impor Jawa Barat memberikan peranan terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat antara 45 hingga 57 persen. Peranan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 57,03 persen dan yang terendah di tahun 2021 yakni sebesar 45,76 persen. Di tahun 2025, peranan impor adalah sebesar 54,99 persen atau lebih rendah dari pada peranan impor di tahun 2025.

Tabel 3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	64,62	64,82	65,81	65,99	65,51
2 Konsumsi LNPRT	0,62	0,61	0,67	0,68	0,67
3 Konsumsi Pemerintah	5,54	5,09	5,09	4,91	4,80
4 PMTB	24,73	23,81	24,55	24,70	24,46
5 Perubahan Inventori	-0,69	0,10	0,08	0,05	0,02
6 Ekspor	50,94	52,65	55,54	60,70	59,53
7 Dikurangi Impor	45,76	47,09	51,74	57,03	54,99
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh perubahan harga dan volume, sedangkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan hanya dipengaruhi oleh perubahan volume. Dalam analisis makro ekonomi, perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara riil (*economic growth*). Indikator laju pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menilai kinerja pembangunan di bidang ekonomi pada suatu wilayah

Kinerja aktivitas ekonomi Jawa Barat yang diukur pada sisi pengeluaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan oleh Tabel 4. Sejak tahun 2021, ekonomi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahun yang tergambarkan pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang selalu positif. Tahun 2021 adalah masa pemulihan pasca terjadinya pandemi Covid-19, dimana pada tahun tersebut aktivitas ekonomi belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal. Hal itu menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat belum kembali ke pola sebelumnya. Perekonomian Jawa Barat di tahun 2024 tercatat naik sekitar 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah laju pertumbuhan terendah selama periode 2021–2025. Memasuki tahun 2022, perekonomian Jawa Barat mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 5,45 persen. Dalam dua tahun berikutnya yakni 2023 dan 2024, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap tumbuh positif meskipun tidak sekuat tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi di dua tahun tersebut berurut-turut adalah sebesar 5,00 persen dan 4,95 persen. Namun tren perlambatan pertumbuhan tersebut tidak berlanjut di 2025. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2025 mampu tumbuh sebesar 5,32 persen atau lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen di tahun tersebut.

Jika dilihat lebih rinci berdasarkan komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran, terlihat bahwa setiap tahun hampir semua komponen mengalami pertumbuhan positif. Komponen yang selalu tumbuh positif selama periode lima tahun terakhir adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, PMTB, dan ekspor-impor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2022. Sementara itu, laju pertumbuhan perubahan inventori tidak bisa dianalisis karena komponen tersebut adalah selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan awal periode, sehingga laju pertumbuhannya tidak relevan untuk dianalisis

Tabel 4 menunjukkan perkembangan masing-masing komponen PDRB pengeluaran selama periode 2021–2025. Pada tabel tersebut terlihat bahwa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) mengalami percepatan pertumbuhan sejak tahun 2021 hingga 2023, kemudian tumbuh melambat di tahun 2024 dan 2025. Selama lima tahun terakhir, komponen PKRT masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di dalam perekonomian Jawa Barat.

Tabel 4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	1,33	4,67	5,34	5,01	4,96
2 Konsumsi LNPRT	1,92	3,13	14,02	7,89	5,19
3 Konsumsi Pemerintah	2,41	-1,60	5,71	1,39	4,42
4 PMTB	6,47	0,29	7,73	6,96	5,29
5 Perubahan Inventori	-152,21	116,44	-19,65	-32,85	-67,42
6 Ekspor	21,94	11,03	12,43	12,11	2,45
7 Dikurangi Impor	18,30	8,85	17,64	15,08	1,01
Total PDRB	3,74	5,45	5,00	4,95	5,32

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga disumbang oleh aktivitas Lembaga NonProfit yang melayani Rumah tangga (LNPRT). Dalam rentang lima tahun terakhir, dinamika perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki pola yang mirip dengan PKRT, yakni mengalami percepatan pertumbuhan di periode 2021–2023 dan tumbuh melambat pada periode 2024–2025. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni mencapai 14,02 persen karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan aktivitas LNPRT khususnya partai politik dalam masa persiapan menjelang Pemilihan Umum di tahun 2024.

Komponen pengeluaran berikutnya adalah pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang dalam masa lima tahun terakhir sempat mengalami kontraksi yakni di tahun 2022. Di tahun tersebut pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai strategi normalisasi APBN/APBD untuk menekan defisit setelah belanja besar-besaran selama masa pandemi Covid-19. Setelah berkontraksi di tahun 2022, pengeluaran konsumsi pemerintah kembali meningkat sebesar 5,71 persen di tahun 2023. Ini adalah pertumbuhan tertinggi pada komponen PKP selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, komponen PKP meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 4,42 persen setelah tumbuh lambat di tahun 2024 yaitu sebesar 1,39 persen. Akselerasi pertumbuhan komponen PKP di tahun 2025 salah satunya dipengaruhi oleh realisasi program unggulan pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Jawa Barat sebagai penerima manfaat terbesar secara Nasional.

Selanjutnya, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengindikasikan investasi fisik menunjukkan perkembangan yang cukup mengesankan sepanjang periode 2021–2025. Laju pertumbuhan PMTB tertinggi adalah pada tahun 2023 yang mencapai 7,73 persen. Di tahun ini pemerintah berfokus menyelesaikan proyek strategis nasional secara massal yang salah satunya adalah pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Di tahun 2025 komponen PMTB masih tumbuh cukup tinggi yakni mencapai 5,29 persen sejalan dengan masih terus berlangsungnya realisasi berbagai proyek strategis nasional di Jawa Barat seperti *groundbreaking* ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Karawang, pengembangan Pelabuhan Patimban, serta pembangunan bendungan dan peningkatan infrastruktur.

Aktivitas ekspor juga selalu menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan pola yang cukup berfluktuasi. Peningkatan kegiatan ekspor Jawa Barat juga diikuti oleh kenaikan kegiatan impor. Dalam periode 2021–2025, pertumbuhan impor hampir selalu di bawah pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2025, aktivitas ekspor maupun impor mengalami kenaikan terendah jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Ekspor meningkat sebesar 2,45 persen dan impor meningkat sebesar 1,01 persen. Ekspor luar negeri Jawa Barat terbesar sepanjang 2025 adalah berupa kendaraan dan bagiannya, sedangkan impor luar negeri Jawa Barat terbesar di 2025 adalah berupa mesin dan perlengkapan elektronik.

Selain perubahan volume, perubahan harga barang dan jasa yang digunakan juga dapat diturunkan dari nilai PDRB menurut pengeluaran. Perubahan harga tersebut merupakan perubahan yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Perubahan harga tercermin pada perubahan nilai indeks implisit. Indeks implisit atau dikenal sebagai deflator PDRB menunjukkan pengaruh perubahan harga pada PDRB dan dihitung dalam dua tahapan. Pertama, dengan menetapkan tahun dasar, dan tahap kedua dengan membandingkan harga saat ini dengan harga di tahun dasar. Adapun indeks implisit PDRB tahun 2021–2025 secara rinci menurut komponen pengeluaran tersaji dalam Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 1. Konsumsi Rumah Tangga	157,24	165,60	172,95	177,64	180,78
2 2. Konsumsi LNPRT	150,48	156,08	162,25	165,02	167,61
3 3. Konsumsi Pemerintah	166,87	171,39	175,64	179,67	181,05
4 4. PMTB	152,33	160,69	166,61	168,58	170,65
5 5. Perubahan Inventori	179,16	179,24	184,46	189,66	197,81
6 6. Ekspor	164,83	168,64	171,45	179,75	185,19
7 7. Impor	197,30	204,97	207,43	213,72	219,53
Total PDRB	146,22	152,38	157,25	161,14	164,67

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai indeks implisit seluruh komponen PDRB menurut pengeluaran meningkat setiap tahun. Hal itu menunjukkan bahwa ada kenaikan harga barang dan jasa yang digunakan di Jawa Barat. Nilai indeks implisit menggambarkan perubahan harga jika dibandingkan dengan harga barang dan jasa di tahun dasar (tahun 2010). Secara total, harga barang dan jasa di Jawa Barat telah naik sekitar 64,67 persen jika dibandingkan dengan harga barang dan jasa di tahun 2010.

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen utama pendorong perekonomian Jawa Barat dengan porsi lebih dari 60 persen selama lebih dari satu dekade terakhir. Kontribusi komponen pengeluaran rumah tangga yang besar ini sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian total. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga akan memberikan andil positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi total wilayah Jawa Barat.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor demografi yang memengaruhi tingkat konsumsi adalah jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan faktor-faktor nonekonomi yang paling berpengaruh terhadap tingkat konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat seperti pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai untuk meniru kelompok masyarakat lain (Rahardja dan Manurung, 2008 dalam Najmi, dkk, 2018).

Tabel 6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
ADHB	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
ADHK (2010=100)	905.974,62	948.326,48	998.976,60	1.048.976,70	1.101.044,65
Proporsi terhadap PDRB (persen)	64,62	64,82	65,81	66,00	65,51
Rata-rata konsumsi rumah tangga/tahun (ribu rupiah)					
ADHB (ribu rupiah)	97.849,03	106.657,41	116.158,21	124.161,58	131.653,15
ADHK (2010=100) (ribu rupiah)	62.227,37	64.405,44	67.163,39	69.895,03	72.823,32
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu rupiah)					
ADHB	29.229,15	31.850,75	34.651,13	37.012,53	39.215,04
ADHK (2010=100)	18.588,36	19.233,19	20.035,50	20.835,69	21.691,61
Pertumbuhan (%)					
a. Total Konsumsi RT	1,33	4,67	5,34	5,01	4,96
b. per-RT	0,16	3,50	4,28	4,07	4,19
c. per kapita	0,12	3,47	4,17	3,99	4,11
Jumlah penduduk (000 orang)	48.738,81	49.306,78	49.860,33	50.345,19	50.759,00

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir, konsumsi rumah tangga Jawa Barat menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Selain dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan rumah tangga. Nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat tahun 2021 adalah sebesar 1.424,60 triliun rupiah atau setara dengan 64,62 persen PDRB Jawa Barat pada tahun tersebut. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di tahun 2021 adalah yang terendah selama periode 2021–2025. Secara rata-rata, proporsi konsumsi rumah tangga

terhadap PDRB Jawa Barat selama lima tahun terakhir adalah sekitar 65,40 persen. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh Tabel 6, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi Jawa Barat. Oleh sebab itu, peningkatan daya beli masyarakat perlu menjadi prioritas perhatian pemerintah.

Jika nilai konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga akan diperoleh indikator berupa rata-rata konsumsi per rumah tangga yang menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangganya, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Berdasarkan harga berlaku, rata-rata konsumsi per rumah tangga di Jawa Barat adalah sebesar 97,85 juta rupiah di tahun 2021 dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, nilai konsumsi rumah tangga per rumah tangga di Jawa Barat mencapai 131,65 juta rupiah atau meningkat sekitar 34,55 persen jika dibandingkan dengan nilai di tahun 2021. Apabila ingin menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi) dari indikator rata-rata konsumsi per rumah tangga, maka penghitungan indikator tersebut hendaklah menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan. Nilai rata-rata konsumsi rumah tangga di Jawa Barat berdasarkan harga di tahun dasar (tahun 2010) adalah sebesar 62,23 juta atau lebih rendah dari pada nilai berdasarkan harga berlaku. Dalam lima tahun, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 72,82 juta rupiah atau naik sekitar 17,03 persen.

Selanjutnya, indikator lain yang bisa diturunkan dari nilai PDRB adalah rata-rata konsumsi per kapita, yaitu dengan membagi nilai konsumsi rumah tangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Seperti halnya pada rata-rata konsumsi per rumah tangga, rata-rata konsumsi per kapita masyarakat Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut terjadi baik pada nilai atas dasar harga berlaku maupun nilai atas harga konstan. Rata-rata konsumsi per kapita Jawa Barat di tahun 2021 tercatat mencapai 29,23 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) dan sebesar 18,59 juta rupiah (atas dasar harga konstan). Nilai tersebut terus meningkat menjadi sebesar 39,22 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) dan sebesar 21,70 juta rupiah (atas dasar harga konstan) di tahun 2025. Perkembangan rata-rata konsumsi per kapita biasanya menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan perubahan jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga selalu searah dan cenderung mirip dengan laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi laju pertumbuhan kedua indikator tersebut terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 4,28 persen untuk rata-rata konsumsi per rumah tangga dan sebesar 4,17 persen untuk rata-rata konsumsi per kapita. Di tahun tersebut laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga Jawa Barat juga tertinggi sepanjang periode 2021–2025 yakni mencapai 5,34 persen.

Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah nilai uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan makan/minum, pakaian, transportasi, hingga kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Berbagai barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok konsumsi. Berdasarkan pengelompokan ini, dapat dilihat proporsi masing-masing kelompok pengeluaran terhadap seluruh pengeluaran masyarakat. Tabel 7 di bawah ini menunjukkan struktur konsumsi masyarakat Jawa Barat berdasarkan jenis kelompok barang/jasa selama lima tahun terakhir.

Tabel 7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025¹

Kelompok Konsumsi	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	45,30	45,98	45,99	46,23	46,06
b Pakaian dan Alas Kaki	3,74	3,57	3,45	3,34	3,30
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,35	10,12	9,89	9,65	9,38
d Kesehatan dan Pendidikan	5,99	5,76	5,61	5,52	5,55
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	23,47	23,62	24,19	24,17	24,04
f Hotel dan Restoran	5,83	5,77	5,77	5,86	5,99
g Lainnya	5,32	5,17	5,10	5,23	5,68
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Terkait dengan struktur penggunaan konsumsi rumah tangga, terdapat suatu teori konsumsi yang cukup terkenal yang dilontarkan oleh Ernst Engel, seorang ekonom dan statistisi asal Jerman. Engel mengatakan bahwa ketika tingkat pendapatan meningkat maka proporsi pendapatan yang akan dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang atau menurun. Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa porsi pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Barat untuk kebutuhan makanan dan minuman adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Dalam kurun waktu 2021–2025, porsi pengeluaran masyarakat untuk makanan, minuman, dan rokok masih di bawah 50 persen, dengan pola yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021, porsi pengeluaran untuk makanan, minuman, dan rokok adalah sebesar 45,30 persen, meningkat menjadi sekitar 45,98 persen (tahun 2022) dan 45,99 persen (tahun 2023). Di tahun 2024 porsi pengeluaran untuk makanan, minuman, dan rokok makin meningkat menjadi 46,23 persen dan sedikit menurun di tahun 2025, yakni sebesar 46,06 persen. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran. Dengan demikian, jika pengeluaran untuk makanan, minuman, dan rokok digabung dengan pengeluaran makanan siap saji, maka porsi pengeluaran penduduk Jawa Barat untuk makanan/minuman akan makin mendekati 50 persen.

Kelompok pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yakni sekitar 23,47 persen di tahun 2021 yang di dua tahun berikutnya meningkat menjadi sekitar 23,62 persen (tahun 2022) dan sekitar 24,19 persen (tahun 2023). Pada tahun 2024 dan 2025, porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya menurun yakni berturut-turut menjadi 24,17 persen dan 24,04 persen.

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Porsi terkecil pada pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Barat adalah konsumsi untuk pakaian dan alas kaki, yakni sekitar 3 persen per tahun pada rentang waktu 2021–2025. Porsi pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki cenderung menurun setiap tahun, yakni sebesar 3,74 persen di tahun 2021, menurun menjadi sebesar 3,57 persen di tahun 2022. Di tahun 2025 porsi pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki makin turun sehingga menjadi sebesar 3,30 persen.

Selain berdasarkan proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan, ukuran kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari pertumbuhan konsumsi riilnya (pengeluaran konsumsi atas dasar harga konstan). Tabel 8 menunjukkan perkembangan pengeluaran konsumsi riil masyarakat Jawa Barat berdasarkan kelompok konsumsi.

Tabel 8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025

Kelompok Konsumsi	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok	2,14	4,43	4,63	3,97	3,84
b Pakaian dan Alas Kaki	0,55	3,44	3,96	3,16	4,29
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,79	4,11	4,90	4,66	4,89
d Kesehatan dan Pendidikan	4,62	3,17	4,14	3,49	5,53
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,80	6,37	7,05	6,83	5,94
f Hotel dan Restoran	0,71	5,01	6,10	6,94	7,27
g Lainnya	0,01	1,84	4,55	4,87	5,03

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa pertumbuhan riil pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan selalu meningkat setiap tahun. Di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yakni di tahun 2021, konsumsi masyarakat untuk makanan, minuman, dan rokok meningkat sebesar 2,14 persen. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih dan kembali ke pola normal. Konsumsi makanan, minuman, dan rokok menunjukkan percepatan pertumbuhan di tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan riil masing-masing sebesar 4,43 persen dan 4,63 persen. Namun pola percepatan pertumbuhan tersebut tidak berlanjut di dua tahun berikutnya, yakni laju pertumbuhan riil konsumsi makanan, minuman, dan rokok terlihat melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,97 persen di 2024 dan 3,84 persen di tahun 2025. Perlambatan pertumbuhan kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih dari mengolah makanan di rumah menjadi membeli makanan siap santap di restoran atau rumah makan. Sistem bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19 berlanjut hingga saat ini. Bahkan sistem WFH berkembang menjadi *Flexible Working Arrangement (FWA)*, yakni sistem kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan menyesuaikan lokasi, waktu, atau cara kerja. Hal ini menyebabkan makin banyak cafe atau restoran yang menyediakan working area yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti akses internet,

stop kontak, dan suasana yang mendukung untuk bekerja atau belajar. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam periode 2021–2025, terlihat laju pertumbuhan riil kelompok konsumsi hotel dan restoran mengalami percepatan pertumbuhan setiap tahunnya. Di tahun 2021 kelompok konsumsi ini hanya tumbuh sebesar 0,71 persen, kemudian meningkat 5,01 persen di tahun 2022. Pada periode 2023–2025 laju pertumbuhan kelompok konsumsi hotel dan restoran mencapai lebih dari level 5 persen, yakni sebesar 6,10 persen di tahun 2023, sebesar 6,94 persen di tahun 2024, dan meningkat lebih cepat lagi di tahun 2025 sebesar 7,27 persen.

Berikutnya pada kelompok konsumsi pakaian dan alas kaki, laju pertumbuhan riil konsumsi masyarakat Jawa Barat selama periode 2021–2025 memperlihatkan percepatan pertumbuhan namun tidak terlalu tinggi (di bawah 5 persen). Pada tahun 2025, laju pertumbuhan kelompok konsumsi pakaian dan alas kaki adalah 4,29 persen (tertinggi dalam lima tahun terakhir). Munculnya industri fast fashion, yaitu model bisnis pakaian yang memproduksi tren mode terbaru secara massal, cepat, dan murah, dan seringkali menggunakan bahan berkualitas rendah dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi konsumsi masyarakat pada kelompok konsumsi pakaian dan alas kaki. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pula pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah kelompok konsumsi yang bersifat pengalaman. Hal itu tercermin pada pertumbuhan riil kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang cukup ekspansif. Di tahun 2021 kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya tumbuh tipis sebesar 0,80 persen, dimana pada saat ini pergerakan masyarakat belum sepenuhnya kembali normal pasca pandemi Covid-19. Namun di tahun 2022–2025, seiring dengan dibukanya pembatasan pergerakan masyarakat, kelompok ini meningkat cukup tinggi (di atas 5 persen) setiap tahunnya.

Kelompok konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga sempat berkontraksi di tahun 2021 sebesar 0,79 persen. Produk yang termasuk ke dalam kelompok konsumsi ini antara lain furnitur dan perabotan rumah tangga, perbaikan ringan tempat tinggal, dan jasa reparasi peralatan rumah tangga dan elektronik. Kondisi ekonomi yang merosot akibat pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat menahan konsumsi dan membuat skala prioritas pengeluaran.

Selanjutnya kelompok konsumsi masyarakat Jawa Barat yang cenderung tumbuh moderat dalam lima tahun terakhir adalah kelompok konsumsi kesehatan dan pendidikan, dan kelompok konsumsi lainnya. Kelompok kesehatan dan pendidikan tumbuh sebesar 4,62 persen di tahun 2021, sedikit melambat menjadi 3,17 persen di tahun 2022. Di tahun 2025 kelompok kesehatan dan pendidikan tumbuh 5,53 persen atau tertinggi sepanjang periode 2021–2025. Sementara itu, kelompok konsumsi lainnya yang antara lain terdiri atas produk keuangan dan asuransi, dan produk perawatan pribadi cenderung tidak tumbuh di tahun 2021 yakni hanya tumbuh sebesar 0,01 persen. Di tahun 2022, kelompok konsumsi ini meningkat sebesar 1,84 persen dan terus meningkat hingga mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,03 persen di tahun 2025.

Keputusan rumah tangga dalam melakukan konsumsi selain dipengaruhi oleh kebutuhan, juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa yang akan dikonsumsi. Perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat diturunkan dari nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga di dalam PDRB. Tabel 9 berikut ini secara menunjukkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Barat menurut kelompok konsumsi.

Perubahan harga kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok selama 2021–2025 cukup berfluktuasi. Di tahun 2021 perubahan harga kelompok konsumsi ini adalah sebesar 2,19 persen, kemudian meningkat cukup tajam sebesar 7,15 persen di tahun 2022. Pada tiga tahun berikutnya terjadi perlambatan kenaikan harga, yakni sebesar 5,17 persen di tahun 2023, 4,28 persen di tahun 2024, dan meningkat lebih lambat sebesar 2,49 persen di tahun 2025. Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dengan tingkat inflasi sebesar 1,22 persen di 2021, sebesar 1,75 persen di 2022, sebesar 2,24 persen di 2023, melambat sebesar 1,44 persen di 2024 dan sebesar 1,03 persen di 2025. Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, dan sifat komoditasnya yang tahan lama. Hal yang lebih memengaruhi harga komoditas ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar.

Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025

Kelompok Konsumsi	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok	2,19	7,15	5,17	4,28	2,49
b Pakaian dan Alas Kaki	1,22	1,75	2,24	1,44	1,03
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,98	3,53	2,48	0,46	-0,95
d Kesehatan dan Pendidikan	0,14	2,76	2,91	2,41	1,82
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,21	4,31	5,23	0,89	0,26
f Hotel dan Restoran	1,85	3,99	3,61	2,50	1,74
g Lainnya	2,25	5,26	3,73	5,50	10,56

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah selama periode 2021–2025 juga menunjukkan kecenderungan stabil, namun sedikit berkontraksi di tahun 2025. Kenaikan harga tertinggi terjadi di tahun 2022 yakni sebesar 3,53 persen dan terendah di tahun 2025 dengan adanya penurunan harga sebesar 0,95 persen. Salah satu penyebab deflasi di kelompok konsumsi ini adalah adanya diskon tarif listrik yang diberlakukan oleh pemerintah di awal tahun 2025.

Harga kelompok konsumsi kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; serta hotel dan restoran tidak menunjukkan gejala yang berarti sepanjang lima tahun terakhir. Sementara itu kelompok konsumsi lainnya meningkat cukup tajam di tahun 2025, yakni

mencapai 10,56 persen. Hal itu salah satunya disebabkan oleh meningkatkan harga perhiasan emas, didorong oleh tren kenaikan harga emas global, di samping kenaikan barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan pasta gigi.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Institusi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan lembaga nonpemerintah yang pembiayaannya bersumber secara mandiri dari masyarakat, baik melalui sumbangan, iuran anggota, hibah, maupun bentuk pendanaan sosial lainnya. Dalam konteks global, lembaga ini dikenal dengan istilah *civil society*, yang mencerminkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di luar struktur pemerintahan dan dunia usaha.

LNPRT berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya, serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Keberadaan LNPRT turut memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan *System of National Accounts (SNA)* 2008, LNPRT diklasifikasikan sebagai salah satu sektor institusi dalam perekonomian, sejajar dengan sektor rumah tangga, pemerintah, korporasi, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, penyusunan kerangka kerja sektor institusi LNPRT menjadi penting untuk menggambarkan kontribusi riilnya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya dari sisi pengeluaran.

Meskipun demikian, peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, seperti konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi LNPRT terhadap perekonomian daerah masih terbatas, namun di sisi lain juga mengindikasikan adanya ruang yang cukup besar untuk peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan LNPRT di masa mendatang.

Nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 10. Penyajian data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan nominal maupun pertumbuhan riil konsumsi LNPRT, serta menjadi bahan evaluasi dalam melihat dinamika peran sektor ini dalam struktur perekonomian wilayah.

Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir LNPRT (miliar rupiah)					
ADHB	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01	20.545,88
ADHK (2010=100)	9.144,60	9.430,85	10.752,89	11.601,21	12.203,69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,62	0,61	0,66	0,68	0,67

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 10, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT Provinsi Jawa Barat selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK 2010). Secara nominal (ADHB), nilai konsumsi LNPRT meningkat dari 13,76 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 20,55 triliun rupiah pada tahun 2025. Sementara dari sisi riil (ADHK 2010), konsumsi akhir LNPRT juga mengalami pertumbuhan yang konsisten, yaitu dari 9,14 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 12,20 triliun rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin aktifnya kegiatan lembaga nonprofit dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 masih memengaruhi aktivitas di Jawa Barat. Meskipun demikian, konsumsi akhir LNPRT tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif LNPRT dalam mendukung penanganan dampak sosial pandemi, seperti penyaluran bantuan sosial, serta berbagai kegiatan dukungan layanan kesehatan masyarakat.

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada periode 2022-2023 dapat dikaitkan dengan meningkatnya kembali aktivitas sosial kemasyarakatan setelah meredanya pandemi Covid-19, sehingga berbagai kegiatan keagamaan, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat kembali berjalan secara lebih optimal.

Lebih lanjut peningkatan konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2022, turut dipengaruhi oleh tingginya kejadian bencana alam di Jawa Barat. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pengeluaran lembaga bantuan kemanusiaan dan LSM dalam kegiatan pertolongan pertama, penanganan korban, dan pemulihan lingkungan terdampak, terutama saat penanganan gempa Cianjur pada November 2022.

Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, yang merupakan tahun persiapan Pemilu 2024. Berbagai kegiatan politik seperti musyawarah daerah (Musda), pembentukan koalisi, rapat konsolidasi, kampanye, dan sosialisasi partai politik berlangsung secara intensif. Pengeluaran konsumsi partai politik sebagai bagian dari LNPRT meningkat cukup besar.

Konsumsi akhir LNPRT kembali meningkat pada tahun 2024, yang merupakan tahun pelaksanaan Pemilu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 serta Pilkada pada 27 November 2024. Namun demikian, kenaikan pada tahun 2024 tidak setinggi lonjakan tahun 2023, karena durasi kegiatan pelaksanaan relatif lebih singkat dibandingkan masa persiapan yang berlangsung intensif pada tahun sebelumnya, serta tingkat semarak Pilkada yang cenderung lebih rendah dibandingkan Pilpres dan Pileg.

Memasuki tahun 2025, aktivitas LNPRT cenderung berada pada fase konsolidasi pascatahun politik 2024. Setelah intensitas kegiatan pemilu menurun, berbagai organisasi masyarakat, yayasan sosial, dan lembaga keagamaan kembali memfokuskan program pada penguatan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal maupun riil konsumsi akhir LNPRT mengalami pertumbuhan, kontribusinya terhadap total PDRB masih relatif terbatas dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dalam lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB tercatat tetap berada di bawah satu persen setiap tahunnya. Meskipun demikian, tren peningkatan yang konsisten tersebut mengindikasikan adanya potensi penguatan peran LNPRT dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat.

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dengan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang, sesuai dengan berbagai aspek dan prioritas yang telah ditetapkan.

Beberapa program prioritas pembangunan nasional yang diusung oleh pemerintah meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur strategis terus dilanjutkan guna memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Di samping itu, penguatan ketahanan pangan dan energi, reformasi birokrasi, serta percepatan digitalisasi layanan publik menjadi agenda utama dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial, serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai *output* untuk komoditas nonpasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai *output* pemerintah nonpasar, ada juga *output* pemerintah dengan harga pasar. *Output* pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen pembentuk total konsumsi akhir dalam suatu perekonomian wilayah. Secara nominal atau atas dasar harga (ADH) berlaku, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH berlaku tercatat sebesar 122,04 triliun rupiah dan meningkat menjadi 145,83 triliun

rupiah pada tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan ADH konstan 2010, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang mencerminkan adanya kenaikan pengeluaran secara riil dari sisi kuantitas. Namun, pada tahun 2022 belanja pemerintah mengalami penurunan menjadi 71,97 triliun rupiah. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya alokasi APBN, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja modal. Memasuki tahun 2023, belanja pemerintah kembali meningkat menjadi 76,08 triliun rupiah. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya belanja barang pemerintah serta adanya kegiatan persiapan Pemilihan Umum yang turut memicu peningkatan belanja, termasuk bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2024, belanja pemerintah kembali mengalami peningkatan dan mencapai 77,14 triliun rupiah. Hal ini didukung oleh naiknya komponen belanja pegawai, pelaksanaan program penanganan stunting yang menasar ibu hamil, calon pengantin, ibu bersalin, balita, serta keluarga berisiko stunting beserta pendampingannya, serta penyelesaian berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2025 belanja pemerintah kembali meningkat menjadi 80,55 triliun rupiah. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya belanja pegawai, pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK sederajat, ibu hamil dan menyusui, serta anak balita, serta kelanjutan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, kontribusinya tercatat sebesar 5,54 persen. Tingginya peranan tersebut berkaitan dengan besarnya belanja pemerintah yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk sektor kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial, serta program pemulihan ekonomi. Setelah itu, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022 dan 2023, kontribusinya masing-masing tercatat sebesar 5,09 persen, kemudian menurun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 4,80 persen pada tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB secara keseluruhan relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah di provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per kapita ADH berlaku di mana selama periode 2021-2022 terjadi penurunan pada rata-rata konsumsi per kapita. Konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku pada tahun 2021 sebesar 2,504,02 ribu rupiah, kemudian tahun 2022 menurun mencapai 2.501,69 ribu rupiah. Lalu pada tahun 2023-2025, rata-rata konsumsi per kapita meningkat menjadi 2,68 juta rupiah pada tahun 2023 (lihat Tabel 11). Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,75 juta rupiah, sedangkan tahun 2025 konsumsi pemerintah per kapita menjadi 2,87 juta rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADH Konstan (2010) menunjukkan adanya tren peningkatan selama periode tahun 2021-2025 (lihat Tabel 11). Hal tersebut dapat dilihat dari laju

pertumbuhannya, pada tahun 2021 konsumsi pemerintah per kapita 1,19 persen. Namun konsumsi pemerintah per kapita berkontraksi pada tahun 2022 sebesar 2,73 persen. Memasuki tahun 2023–2025 konsumsi pemerintah per kapita kembali meningkat yakni 4,54 persen untuk tahun 2023, sementara pada tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,41 persen dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 3,57 persen.

Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)					
ADHB	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.593,75	145.833,63
ADHK (2010=100)	73.136,39	71.969,80	76.081,30	77.136,19	80.548,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,54	5,09	5,09	4,91	4,80
Konsumsi pemerintah per kapita (ribu rupiah)					
ADHB	2.504,02	2.501,69	2.680,03	2.752,87	2.873,06
ADHK (2010=100)	1.500,58	1.459,63	1.525,89	1.532,15	1.586,88
Konsumsi Pemerintah per pegawai (ribu rupiah)					
ADHB	327.907,01	286.648,35	317.155,91	315.451,81	230.985,88
ADHK (2010=100)	202.143,11	167.247,56	180.574,60	175.568,89	127.580,92
Pertumbuhan (%)					
Total Konsumsi Pemerintah	2,41	-1,60	5,71	1,39	4,42
Konsumsi pemerintah per kapita	1,19	-2,73	4,54	0,41	3,57
Konsumsi Pemerintah per pegawai	1,12	8,94	-9,63	-1,15	-5,01
Jumlah penduduk (000 orang)	48.156,23	48.738,81	49.306,78	49.860,33	50.345,19
Jumlah pegawai (000 orang)	384,86	361,81	393,99	421,35	449,70

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Jumlah penduduk per kapita Tahun 2021 – 2025 berdasarkan Proyeksi Hasil SP2020

Pegawai terdiri dari PNS Pusat, Daerah dan PPPK Pusat, Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2021–2025 rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai ADH Berlaku menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah per pegawai tercatat sebesar 337,32 juta rupiah. Memasuki tahun 2022, nilainya menurun menjadi 313,08 juta rupiah, pada tahun 2023, rata-rata konsumsi per pegawai kembali meningkat menjadi 317,16 juta rupiah. Namun demikian, pada periode 2024–2025 kembali terjadi penurunan, masing-masing menjadi 315,45 juta rupiah pada tahun 2024 dan turun cukup signifikan menjadi 206,51 juta rupiah pada tahun 2025.

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan berdasarkan konsumsi pemerintah per pegawai menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah per pegawai tumbuh sebesar 8,94 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi kontraksi yang cukup dalam sebesar 9,63 persen. Memasuki tahun 2023, konsumsi pemerintah per pegawai masih mengalami kontraksi, meskipun dengan tingkat penurunan yang lebih kecil, yaitu sebesar 1,15 persen. Pada tahun 2024, kontraksi kembali terjadi sebesar 2,77 persen. Penurunan yang paling signifikan tercatat pada tahun 2025, ketika konsumsi pemerintah per pegawai berkontraksi cukup dalam hingga 35,03 persen.

Di sisi lain, selama periode tahun 2021-2025 jumlah pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021, jumlah pegawai pemerintah tercatat sebanyak 372.188 orang. Pada tahun 2022, pemerintah kembali membuka rekrutmen dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Kebijakan ini mendorong peningkatan jumlah pegawai menjadi 393.986 orang, yang terdiri atas 344.118 orang PNS dan 49.868 orang PPPK. Selanjutnya, pada periode 2023-2025 pemerintah kembali membuka penerimaan CPPPK serta Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (CPPPKPW). Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan signifikan jumlah pegawai pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, jumlah pegawai tercatat sebanyak 421.329 orang, terdiri atas 327.676 orang PNS dan 93.653 orang PPPK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai kembali meningkat menjadi 439.350 orang, yang terdiri atas 307.283 orang PNS dan 132.067 orang PPPK. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang cukup besar sehingga jumlah pegawai mencapai 706.193 orang, dengan komposisi 307.952 orang PNS dan 398.241 orang PPPK. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah pegawai pemerintah selama periode tersebut terutama didorong oleh bertambahnya jumlah PPPK, sementara jumlah PNS relatif stabil dan cenderung menurun pada beberapa tahun.

Secara umum, gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” tersebut menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, yang terdiri dari dua komponen, yakni pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Akta Tanah, perijinan dan layanan administrasi lainnya. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), singkatnya adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani publik dengan target tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas. Dalam konsumsi ini termasuk juga biaya untuk perlindungan sosial.

Tabel 12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah (ADHB)					
Konsumsi Kolektif (miliar rupiah)	66.564,86	66.901,98	74.677,46	78.655,53	74.032,31
%	54,54	55,24	55,89	56,75	50,76
Konsumsi Individu (miliar rupiah)	55.478,20	56.448,25	58.949,53	59.938,22	71.801,32
%	45,46	45,76	44,11	43,25	49,25
Total Konsumsi (miliar rupiah)	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.593,75	145.833,63
%	100	100	100	100	100
Pertumbuhan riil ADHK (2010=100) (%)					
Konsumsi Kolektif	-6,75	-1,90	8,95	3,11	-6,56
Konsumsi Individu	15,94	-1,23	1,90	-0,78	18,82
Total Konsumsi	2,41	-1,60	5,71	1,39	4,42
Pertumbuhan indeks harga implisit (%)					
Konsumsi Kolektif	2,66	2,46	2,45	2,15	0,73
Konsumsi Individu	1,53	3,01	2,49	2,48	0,82
Total Konsumsi	2,15	2,71	2,48	2,30	0,77

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

Secara struktur, porsi terbesar dari total konsumsi akhir pemerintah dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi kolektif, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang bersifat kolektif bagi masyarakat. Meskipun demikian, proporsi pengeluaran konsumsi kolektif terhadap total konsumsi akhir pemerintah menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, kontribusinya tercatat sebesar 54,54 persen. Selanjutnya, proporsi tersebut meningkat secara bertahap pada periode 2022–2024, masing-masing menjadi 55,24 persen pada tahun 2022, 55,89 persen pada tahun 2023, dan mencapai 56,75 persen pada tahun 2024. Secara nominal, nilai pengeluaran konsumsi kolektif pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,66 triliun rupiah.

Namun, pada tahun 2025 proporsinya mengalami penurunan menjadi 50,76 persen, dengan nilai sebesar 74,03 triliun rupiah. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan komposisi belanja pemerintah, khususnya dalam alokasi antara konsumsi kolektif dan konsumsi individu.

Secara nominal, konsumsi individu pemerintah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2025. Pada tahun 2021, nilainya meningkat sebesar 8,35 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 konsumsi individu meningkat menjadi 56,45 triliun rupiah (lihat Tabel 12). Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai nominal mencapai 58,95 triliun rupiah. Pada tahun 2024, konsumsi individu kembali meningkat sebesar 988,69 miliar rupiah sehingga mencapai 59,94 triliun rupiah. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025, yaitu sebesar 11,86 triliun rupiah, dengan total nilai nominal mencapai 71,80 triliun rupiah. Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan peranannya terhadap total konsumsi pemerintah. Pada periode 2020–2022, kontribusi konsumsi individu cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya tercatat sebesar 44,11 persen, kemudian menurun

menjadi 43,25 persen pada tahun 2024. Meskipun secara nominal masih meningkat pada tahun 2024, proporsinya terhadap total konsumsi pemerintah justru mengalami penurunan. Sebaliknya, pada tahun 2025 peningkatan nilai nominal konsumsi individu diikuti oleh kenaikan kontribusinya terhadap total konsumsi pemerintah, yang mencapai 49,25 persen. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur belanja pemerintah yang relatif lebih besar pada komponen konsumsi individu dibandingkan tahun sebelumnya.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Investasi merupakan komponen PDB/PDRB yang menghubungkan antara saat ini dan masa mendatang. Investasi memegang peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan siklus usaha jangka panjang tetapi juga dalam jangka pendek karena merupakan komponen yang paling tidak stabil dalam PDRB. Mankiw (2010) mengemukakan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu sejumlah tiga per empat dari total adalah investasi tetap bisnis. Adapun yang dimaksud bisnis adalah investasi barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi yang akan datang. Kata tetap artinya pengeluaran ini untuk kapital yang akan tinggal untuk sementara sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup semuanya, mulai dari perabot kantor hingga pabrik, komputer, dan mobil perusahaan.

Perkembangan investasi fisik di wilayah Jawa Barat selama tahun 2025 tercermin dari beberapa indikator ekonomi yaitu informasi belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dan belanja modal nonbangunan yang dilakukan oleh seluruh institusi pelaku ekonomi, rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, dan korporasi. Informasi pendukung untuk mengetahui nilai investasi dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan di kawasan industri Jawa Barat.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan investasi fisik tertuang dalam kebijakan pembangunan wilayah berupa pencapaian visi dan misi. Visi Jawa Barat tahun 2025–2045 yang diusung adalah “menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan”. Untuk mendukung pencapaian visi ini maka dijabarkan ke dalam empat misi. Pembangunan infrastruktur memiliki relevansi dengan misi ketiga yaitu mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang berbagai program kerja dan kegiatan yang relevan.

Berbagai program yang digulirkan pemerintah membuahkan hasil. Dilansir dari rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selama periode 2021 – 2025 total realisasi investasi di Jawa Barat baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri selalu mengungguli realisasi investasi PMA dan PMDN provinsi lainnya di Indonesia. BKPM mencatat realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 sebesar 296,8 triliun rupiah atau 15,4 persen dari seluruh realisasi investasi di Indonesia dan berhasil menyerap sekitar 303 ribu tenaga kerja hingga akhir September 2025. Hal ini didukung dengan menggeliatnya pembangunan beberapa proyek strategis nasional baru di Jawa Barat, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan Patimban, program percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, serta pembangunan beberapa pabrik baru pada sektor kendaraan listrik (EV).

Seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, aktivitas investasi fisik di Jawa Barat mengalami peningkatan mulai tahun 2021. Nilai PMTB ADH berlaku pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 545,30 triliun rupiah dan 576,90 triliun rupiah. Nilai PMTB tahun 2023 meningkat dibandingkan nilai tahun 2022 menjadi 644,38 triliun rupiah. Nilai PMTB tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 697,37 triliun rupiah. Adapun nilai PMTB tahun 2025 meningkat sebesar 45,91 triliun rupiah menjadi sebesar 743,28 triliun rupiah.

Selain dinilai ADH berlaku, PMTB juga dinilai menurut ADH konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang divalusi dengan harga pada tahun 2010. Pengeluaran untuk pembentukan kapital (PMTB) mempunyai tren yang sama antara ADH konstan dengan ADH berlakunya. Kinerja PMTB pada tahun 2021 mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 tumbuh sebesar 6,47 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 357,98 triliun rupiah.

Pada tahun 2022, kinerja PMTB melambat sebesar 0,29 persen dengan nilai mencapai 359,01 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kinerja PMTB mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,73 persen. Kinerja PMTB tahun 2024 masih mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen atau meningkat sebesar 26,91 triliun rupiah menjadi 413,66 triliun rupiah. Adapun pada tahun 2025, komponen PMTB tumbuh sebesar 5,29 persen menjadi 435,55 triliun rupiah. Peningkatan nilai PMTB ADH konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

Komponen PMTB dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Rata-rata peranan komponen PMTB selama tahun 2021 – 2025 sebesar 24,45 persen terhadap total PDRB. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PMTB terhadap perekonomian Jawa Barat mengalami capaian terbesar di tahun 2021 yaitu sebesar 24,73 persen dan terendah di tahun 2022 sebesar 23,81 persen.

Tabel 13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah PMTB (miliar rupiah)					
ADHB	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
ADHK (2010=100)	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87	435.547,55
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	24,73	23,81	24,55	24,70	24,46
Struktur PMTB ¹					
Bangunan (miliar rupiah)	436.960,10	452.921,79	498.215,80	537.204,57	571.480,84
%	80,13	78,51	77,32	77,03	76,89
Non-Bangunan (miliar rupiah)	108.337,54	123.973,46	146.163,66	160.165,13	171.794,57
%	19,87	21,49	22,68	22,97	23,11
Jumlah PMTB (miliar rupiah)	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ² (%)					
Bangunan	5,84	-2,01	6,21	7,07	5,37
Non-Bangunan	9,22	9,91	13,42	6,57	5,00
Jumlah PMTB	6,47	0,29	7,73	6,96	5,29

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Komponen PMTB didisagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Jawa Barat. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB bangunan sebesar lebih dari tiga per empat bagian total PMTB. Peranan komponen PMTB bangunan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 80,13 persen dan berangsur-angsur mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 78,51 persen, tahun 2023 menjadi 77,32 persen, tahun 2024 menjadi 77,03 persen dan tahun 2025 sebesar 76,89 persen.

Sementara itu, komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Selama periode 2021 – 2025, peranan PMTB nonbangunan terbesar terjadi pada tahun 2025 sebesar 23,11 persen dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 19,87 persen. Peranan komponen PMTB nonbangunan memiliki kecenderungan yang meningkat mulai tahun 2021 sampai tahun 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontribusi PMTB bangunan.

Pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi, kinerja PMTB bangunan mengalami peningkatan sebesar 5,84 persen. Namun mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pengadaan semen sepanjang tahun 2022 yang mengalami penurunan 11,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali sebesar 6,21 persen didukung oleh menggeliatnya pembangunan strategis di Jawa Barat, seperti proyek KCJB, proyek pembangunan tol, serta pembangunan

Pelabuhan Patimban. Pada tahun 2024, PMTB bangunan mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Adapun pada tahun 2025, PMTB bangunan juga masih tumbuh sebesar 5,37 persen didukung oleh pembangunan beberapa proyek strategis nasional baru di Jawa Barat dan beberapa program pemerintah yang turut mendorong pertumbuhan PMTB bangunan, seperti renovasi sekolah untuk program Sekolah Rakyat serta pembangunan dapur SPPG dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

Sementara itu, indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan penambahan barang modal berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dicermati pada data Impor Barang Modal menurut penggolongan penggunaan barang atau Broad Economics Category (BEC). Komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Kinerja subkomponen PMTB nonbangunan pada periode 2021 – 2025 cenderung berfluktuasi. Belanja barang modal kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan kinerja positif masing-masing sebesar 9,22 persen dan 9,91 persen. Puncak pertumbuhan subkomponen PMTB non bangunan terjadi pada tahun 2023 sebesar 13,42 persen. Adapun pada tahun 2024 pertumbuhan subkomponen tersebut tumbuh sebesar 6,57 persen dan terus mengalami perlambatan sebesar 5,00 persen pada tahun 2025.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Deskripsi inventori pada unit institusi merupakan persediaan barang yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, belum selesai diproses, atau belum terjual. Sementara perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan. Secara makro, inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang nilainya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Perubahan inventori yang bertanda positif bermakna bahwa terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan jika bertanda negatif bermakna bahwa terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dalam perekonomian Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cukup rendah, yakni selalu berada di bawah 4 persen setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021 nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif, yang berarti terjadi penurunan inventori di akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun. Pada tahun 2025 kontribusi komponen

perubahan inventori sebesar 0,05 persen. Perkembangan nilai komponen perubahan inventori dan proporsinya dalam perekonomian Jawa Barat selama periode 2021–2025 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (miliar rupiah)					
ADHB	-15.151,20	2.492,32	2.061,05	1.423,05	484,55
ADHK (2010=100)	-8.456,84	1.390,51	1.117,33	750,32	244,45
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ¹	-0,69	0,10	0,08	0,05	0,02

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Pada tahun 2021, dalam masa kondisi pandemi namun terdapat pelonggaran aktivitas ekonomi yang diterapkan di tersebut berdampak positif pada perbaikan perekonomian Jawa Barat. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,52 di tahun 2020, produksi barang dan jasa Jawa Barat kembali meningkat di 2021, tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang bernilai positif sebesar 3,74 persen. Peningkatan utilitas produksi memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, sedangkan barang jadi yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan di tahun 2020 sudah mulai terdistribusikan seiring dengan penerapan PPKM berlevel. Hal itu mengakibatkan inventori di akhir tahun 2021 menjadi lebih rendah dari pada kondisi di awal tahun. Kondisi tersebut berimplikasi pada nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif yaitu senilai -15,15 triliun rupiah atau menurun sekitar 42,46 triliun rupiah jika dibandingkan nilai di tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2022, perekonomian Jawa Barat kembali mendekati kondisi normal. Perubahan inventori kembali meningkat menjadi sebesar 2,50 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 116,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran perubahan inventori menunjukkan angka positif yang dapat diartikan bahwa terjadi penambahan dalam persediaan barang.

Di tahun 2023, perekonomian Jawa Barat berangsur kembali normal seiring peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 seiring penetapan berakhirnya status Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Kepres No.17 Tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai nominal perubahan inventori sebesar 2,06 triliun rupiah atau menurun 431,27 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, proporsi perubahan inventori di dalam perekonomian Jawa Barat sedikit mengalami penurunan menjadi 0,08 persen.

Secara keseluruhan Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat menunjukan kondisi yang normal setelah beberapa tahun sebelumnya dilanda pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 nilai nominal perubahan inventori sebesar 1,42 triliun rupiah atau menurun 638,01 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, namun untuk proporsi perubahan inventori dalam perekonomian Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 0,05 persen.

Pada tahun 2025, nilai perubahan inventori tercatat sebesar 484,55 miliar rupiah (ADHB). Dilihat dari sisi kontribusinya terhadap PDRB, perubahan inventori pada tahun 2025 sebesar 0,02 persen, turun dari 0,08 persen pada tahun 2024 dan jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi tahun 2021 yang mencapai 1,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran akumulasi stok barang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 relatif sangat kecil, hal tersebut disebabkan oleh normalisasi ekonomi pasca-Pemilu, stabilisasi permintaan, efisiensi manajemen persediaan, serta penyesuaian produksi sektor industri.

Perubahan nilai nominal komponen perubahan inventori dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga, sehingga untuk melihat kondisi perubahan inventori dalam nilai riilnya, dapat digunakan nilai atas dasar harga konstan. Dalam lima tahun terakhir nilai riil komponen perubahan inventori Jawa Barat memperlihatkan pola yang sama dengan nilai nominalnya. Memasuki tahun 2021, produsen mulai meningkatkan tingkat utilitas seiring dengan kebijakan pelonggaran aktivitas pada sejumlah sektor ekonomi. Dalam proses produksi, pelaku usaha masih lebih banyak memanfaatkan bahan baku yang tersedia karena aktivitas impor belum sepenuhnya kembali normal. Di sisi lain, distribusi barang berlangsung lebih lancar dibandingkan tahun 2020 sehingga stok barang yang sebelumnya tertahan dapat dikurangi. Kondisi tersebut berimplikasi pada nilai riil komponen perubahan inventori yang masih bertanda negatif, yaitu sebesar -8,46 triliun rupiah. Pada tahun 2022, komponen perubahan inventori secara riil mengalami pemulihan dan kembali mencatatkan angka positif sebesar 1,39 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya penambahan stok barang seiring dengan membaiknya aktivitas produksi dan perdagangan. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai riil perubahan inventori mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap berada pada posisi positif sebesar 1,12 triliun rupiah. Tren perlambatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 750,32 miliar rupiah. Memasuki tahun 2025, nilai riil perubahan inventori kembali menurun menjadi 244,45 miliar rupiah, meskipun masih menunjukkan angka positif. Penurunan bertahap sejak 2023 tersebut mengindikasikan bahwa akumulasi stok barang cenderung semakin kecil, sejalan dengan penyesuaian produksi terhadap permintaan serta stabilisasi aktivitas ekonomi.

Perubahan inventori merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian inventori merupakan bagian dari investasi, sedangkan perubahan inventori terjadi karena adanya proses produksi maupun impor. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengamati aktivitas inventori antara lain dengan mengamati nilai impor bahan baku. Data KPPBC lingkup Jawa Barat menunjukkan kontribusi impor bahan baku yang dilakukan oleh Jawa Barat sangat signifikan yaitu sebesar 81,34 persen pada tahun 2025. Jenis impor bahan baku dominan adalah kelompok bahan baku untuk industri dengan kontribusi sekitar 52,47 persen dari keseluruhan nilai impor Jawa Barat di tahun 2025. Secara kumulatif, nilai impor bahan baku/penolong Jawa Barat tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,51 persen dibandingkan tahun lalu. Pendekatan lain untuk mengamati perubahan inventori adalah melalui data persediaan dan produksi beras. Berdasarkan data hasil KSA (Kerangka Sampel Area) tahun 2025, produksi padi Jawa Barat meningkat sebesar 18,54 persen dibandingkan produksi tahun

2024, yaitu dari sebanyak 8,63 juta ton di tahun 2024 menjadi 10,23 juta ton di tahun 2025 atau mengalami peningkatan sebanyak 1,60 juta ton GKG.

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Komoditas yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor berasal dari *output* yang dihasilkan oleh aktivitas produksi suatu wilayah pada suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan konsumsi dan investasi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi oleh residen di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh nonresiden pihak di luar wilayah atau luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari nonresiden. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestik dari nonresiden di mana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan efek domino terhadap perekonomian, terutama berdampak pada aktivitas perdagangan internasional. Pemulihan ekonomi global mulai terlihat sejak tahun 2021 dan terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023. Hal ini terlihat dari data transaksi perdagangan antar negara yang menunjukkan peningkatan. Permintaan global terhadap komoditas yang berasal dari Jawa Barat khususnya masih mengalami peningkatan meskipun melemah.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi ekspor luar negeri terbesar di tingkat nasional. Ekspor Indonesia terbesar menurut provinsi asal barang periode Januari - Desember 2025 adalah Jawa Barat dengan nilai US\$38,72 miliar (13,69 persen), diikuti oleh Jawa Timur sebesar US\$29,12 miliar (10,29 persen), dan Kepulauan Riau sebesar US\$23,41 miliar (8,28 persen). Data ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Jawa Barat memiliki dampak signifikan di tingkat nasional, hal ini tidak terlepas dari peranan utama ekspor sebagai penghasil devisa negara. Selain itu ekspor berperan dalam perluasan pasar bagi produk domestik, peningkatan jumlah investasi dalam negeri, serta memperbaiki ekonomi negara karena dapat memperbesar cadangan devisa negara tersebut.

Komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif wilayah. Aktivitas ekspor tahun 2025 mengalami peningkatan kinerja. Secara nominal atas dasar harga berlaku komponen Ekspor Barang dan Jasa pada lima tahun terakhir (2021-2025) mengalami penambahan sebesar 685,97 triliun rupiah, nilai ekspor pada tahun 2021 masih pada posisi 1,12 triliun rupiah dan pada tahun 2025 telah mencapai 1,81 triliun rupiah. Sementara secara riil nilai pada tahun 2021 sebesar 681,32 triliun rupiah dan tahun 2025 telah mencapai 976,82 triliun rupiah atau terjadi penambahan selama kurun waktu tersebut sebesar 295,51 triliun rupiah.

Peranan komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap total perekonomian Jawa Barat selama 2021 – 2025 secara rata-rata sebesar 55,87 persen. Selama lima periode (2021 – 2025) kontribusi komponen ini cenderung mengalami peningkatan. Komponen Ekspor Barang dan Jasa ini meskipun memiliki kontribusi yang besar dan berperan sebagai faktor penambah dalam perekonomian perlu dibandingkan dengan kontribusi komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam perekonomian.

Tabel 15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (miliar rupiah)					
ADHB	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.122,26	1.713.849,73	1.808.954,71
ADHK (2010=100)	681.316,21	756.452,62	850.474,86	953.477,44	976.824,05
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB) ¹	50,94	52,65	55,54	60,70	59,53
Pertumbuhan Total Ekspor (%) ²	21,94	11,03	12,43	12,11	2,45

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selama tahun 2021 – 2025, kinerja ekspor Jawa Barat cenderung mengalami pertumbuhan, meskipun pada tahun 2025 mengalami perlambatan. Pemulihan ekonomi global memicu permintaan terhadap komoditas ekspor Jawa Barat sehingga terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 21,94 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kinerja Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 11,03 persen akibat perang panas Rusia dan Ukraina yang mengganggu arus perdagangan internasional. Pada tahun 2023 ekspor Jawa Barat mengalami akselerasi sebesar 12,43 persen, namun kembali melambat pada tahun 2024 sebesar 12,09 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025, ekspor Jawa Barat masih mengalami perlambatan sebesar 2,45 persen.

Berdasarkan kontribusi terhadap nilai ekspor barang luar negeri, urutan negara tujuan ekspor barang luar negeri Jawa Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1) Amerika Serikat US\$6,35 miliar (16,40 persen); 2) Filipina US\$3,54 (9,13 persen); 3) Jepang US\$2,84 (7,33 persen); 4) Vietnam US\$2,23 (5,77 persen); dan 5) Korea Selatan US\$2,09 (5,39 persen). Kelima negara tujuan ekspor ini berkontribusi hampir separuh dari total ekspor barang luar negeri Jawa Barat atau sebesar 44,02 persen. Ekspor barang luar negeri Jawa Barat dengan tujuan kelima negara tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2025.

Komoditas ekspor barang luar negeri utama Jawa Barat pada tahun 2025 berdasarkan peranannya terhadap ekspor barang luar negeri total adalah 1) Kendaraan dan Bagiannya (21,95 persen); 2) Mesin/Peralatan Listrik (16,10 persen); 3) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (8,37 persen); 4) Barang-barang Rajutan (5,18 persen); 5) Karet dan Barang dari Karet (3,85 persen); 6) Alas kaki (3,61 persen); 7) Pakaian Jadi Bukan Rajutan (3,56 persen); 8) Serat Stafel Buatan (2,30 persen); 9) Kertas/Karton (2,25 persen); dan 10) Perhiasan / Permata (1,93 persen).

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Kebutuhan terhadap barang dan jasa seluruh entitas ekonomi di Jawa Barat tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari *output* hasil produksi wilayah Jawa Barat. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu alasan dilakukannya aktivitas permintaan barang dan jasa dari luar wilayah Jawa Barat yaitu luar provinsi dan luar negeri. Pemenuhan kebutuhan konsumsi antara untuk sektor bisnis dan konsumsi akhir serta investasi dapat dilakukan dengan impor barang dan jasa.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran. Pengukuran potensi dan besaran produk domestik dilakukan dengan mengeluarkan komponen Impor Barang dan Jasa dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan secara konsep sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Tabel 16 di bawah ini menunjukkan perkembangan impor barang dan jasa Jawa Barat dalam lima tahun terakhir.

Selama tahun 2021–2025 komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan secara nominal seiring meningkatnya aktivitas produksi yang membutuhkan bahan baku, di mana impor bahan baku memiliki kontribusi terbesar dalam impor Jawa Barat. Besaran impor total pada tahun 2021 pada posisi 1.008,87 triliun rupiah kemudian pada tahun 2025 mencapai 1.670,85 triliun rupiah dengan penambahan nilai selama kurun lima tahun sebesar 661,98 triliun rupiah. Sementara secara riil nilai komponen ini pada tahun 2021 sebesar 511,35 triliun rupiah dan pada tahun 2025 telah mencapai 761,10 triliun rupiah atau terjadi penambahan nilai sebesar 249,75 triliun rupiah.

Tabel 16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor (miliar rupiah)					
ADHB	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.154,15	1.610.331,45	1.670.850,32
ADHK (2010=100)	511.346,46	556.591,43	654.748,40	753.479,53	761.096,26
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB) ¹	45,76	47,09	51,74	57,03	54,99
Pertumbuhan Total Impor (%)	18,30	8,85	17,64	15,08	1,01

Catatan *angka sementara

**angka sangat sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Peranan Impor Barang dan Jasa selama tahun 2021 – 2024 terhadap perekonomian Jawa Barat memiliki tendensi yang meningkat, namun pada tahun 2025 menurun. Selama periode lima tahun terakhir (2021 – 2025) peranan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 57,03 persen dan peranan terkecil pada tahun 2021 sebesar 45,76 persen. Komposisi impor mencapai 50 persen ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Barat memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas dari luar provinsi dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan karakteristik jenis impor Jawa Barat yaitu mayoritas merupakan impor bahan baku yaitu sebesar 77,69 persen pada tahun 2024,

sementara pada tahun 2025 impor bahan baku memiliki kontribusi sebesar 81,34 persen.

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama tahun 2021 – 2025 cenderung meningkat. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 sebesar 18,30 persen seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2022, kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 8,85 persen akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak signifikan terhadap perdagangan global. Adapun pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 17,64 persen dan melambat pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 15,07 persen dan 1,01 persen. Apabila dicermati, kinerja Komponen Impor Barang dan Jasa setiap periode selama lima tahun (2021 – 2025) memiliki pola yang sama dengan kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Pertumbuhan impor yang tinggi di satu sisi bagi Jawa Barat dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi perekonomian wilayah.

Distribusi impor luar negeri menurut klasifikasi *Broad Economic Categories (BEC)* yaitu menunjukkan kategori akhir penggunaan barang. pada tahun 2025 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 81,34 persen (2) impor barang modal sebesar 10,50 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 8,16 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika permintaan terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impor untuk memenuhi bahan baku atau barang modal.

Komoditas andalan impor barang luar negeri Jawa Barat berdasarkan peranannya terhadap total impor barang luar negeri pada tahun 2025 adalah 1) Mesin/Peralatan Listrik (13,56 persen); 2) Bahan Bakar Mineral (12,24 persen); 3) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (8,32 persen); 3) Kendaraan dan Bagiannya (7,74 persen); 4) Plastik dan Barang dari Plastik (7,73 persen); 5) Kain Rajutan (6,88 persen); 6) Filamen Buatan (6,29 persen); 7) Kendaraan dan Bagiannya (5,03 persen); 8) Bahan Kimia Anorganik (3,90 persen); 9) Kapas (3,57 persen), dan 10) Serat Stafel Buatan (2,27 persen). Kontribusi kesepuluh komoditas utama impor barang luar negeri Jawa Barat mencapai 70,18 persen dari total nilai impor barang luar negeri Jawa Barat.

Negara-negara importir utama Jawa Barat pada tahun 2025 dengan kontribusi terbesar berturut-turut adalah sebagai berikut: 1) Tiongkok US\$4,07 miliar (34,20 persen); 2) Jepang US\$1,40 miliar (11,72 persen); 3) Korea Selatan US\$1,35 miliar (11,36 persen); 4) Australia US\$0,90 miliar (7,59 persen); dan 5) Taiwan US\$0,60 miliar (5,06 persen). Kelima negara asal impor ini berkontribusi lebih dari tiga perempat bagian dari total impor Jawa Barat atau sebesar 87,47 persen. Pada tahun 2025, kinerja impor Jawa Barat yang berasal dari kelima negara memiliki pertumbuhan positif, kecuali Jeang, Korea Selatan, dan Australia.

Neraca perdagangan Jawa Barat pada tahun 2025 mengalami surplus sebesar US\$26,81 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus pada tahun 2024 sebesar US\$24,81 miliar. Surplus neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2025 terjadi dengan negara Amerika Serikat, artinya ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat lebih besar dibandingkan dengan impor Amerika Serikat ke Jawa Barat dengan nilai yang sangat signifikan yaitu sebesar US\$5,95 miliar, dimana nilai ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2024 yaitu sebesar US\$5,96 miliar. Adapun defisit neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2025 terjadi dengan negara Tiongkok artinya ekspor Jawa Barat ke Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan impor Tiongkok ke Jawa Barat dengan nilai sebesar US\$2,09 miliar, lebih besar dibandingkan defisit tahun 2024 sebesar US\$1,50.

<https://jabar.bps.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021—2025

BAB

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021–2025

Perekonomian global hingga akhir tahun 2025 menunjukkan ketahanan meskipun masih diwarnai oleh ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan. Rata-rata nilai *Purchasing Manager's Index (PMI)* global pada sektor manufaktur yang di tahun sebelumnya berada di bawah level 50 (kontraksi), di tahun 2025 menunjukkan pola ekspansif (di atas 50). Hal yang sama terjadi pada perekonomian Indonesia yang tumbuh menguat pada tahun 2025.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 5,11 persen, mengalami akselerasi sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2022 (pasca pandemi Covid-19). Jawa Barat sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia mencetak pola pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pola nasional. Pada tahun 2023 ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,00 persen, kemudian mengalami perlambatan di tahun 2024 dengan capaian laju pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Namun di 2025, mesin perekonomian Jawa Barat mampu bekerja lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional, sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,37 persen poin yakni menjadi 5,32 persen. Kinerja positif ditunjukkan oleh semua komponen pengeluaran yakni pengeluaran rumah tangga, pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pengeluaran pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan ekspor-impor.

Perubahan kinerja ekonomi tentunya berpengaruh terhadap perubahan pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB, dan nilai PDRB total. Demikian juga perbandingan antara nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran. PDRB sisi pengeluaran mengukur nilai produk domestik dari sisi pengguna yaitu menggambarkan siapa pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, yaitu rumah tangga, LNPRT, perusahaan, pemerintah, dan luar wilayah/luar negeri. Agregat PDRB pengeluaran ini merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Agregat tersebut merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas keseluruhan ekonomi. Namun demikian, di dalam analisis perbandingan pengeluaran PDRB untuk permintaan akhir baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Ekspor, masih termasuk sebagian produk yang berasal dari Impor.

4.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran 2021-2025

Agregat PDRB pengeluaran menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, nilai tambah bruto yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi) atas faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDRB.

PDRB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi. PDRB menurut pengeluaran menjelaskan sejumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas yang menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Namun, di dalam nilai agregat PDRB masih terkandung nilai penyusutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah adalah melalui indikator nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Rangkaian data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Jawa Barat dalam menciptakan nilai tambah bruto dari tahun ke tahun. Tabel 17 berikut memberikan gambaran perkembangan PDRB Jawa Barat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, serta perkembangan nilai per kapita dan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir (2021–2025).

Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
- ADHB	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95
- ADHK 2010	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.406,36	1.752.124,20	1.845.316,74
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
- ADHB	45.234,18	49.136,90	52.651,05	56.081,86	59.864,61
- ADHK 2010	30.935,23	32.246,78	33.481,65	34.802,22	36.354,47
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)	2,50	4,24	3,83	3,94	4,46
Jumlah penduduk (000 org)	48.738,81	49.306,78	49.860,33	50.345,19	50.759,00
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,29	1,22	1,18	1,13	1,06

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Pasca pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Barat perlahan mengalami pemulihan yang dimulai sejak triwulan II tahun 2021. Pada tahun 2021 ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 3,74 persen atau masih di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19. Namun dalam dua tahun berikutnya, perekonomian Jawa Barat sudah kembali ke laju pertumbuhan normalnya, yaitu sebesar 5,45 persen di tahun 2022 dan 5,00 persen di tahun 2023. Memasuki tahun 2024, perekonomian Jawa Barat mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 4,95 persen. Bukan hanya Jawa Barat, perlambatan pertumbuhan juga dialami oleh seluruh provinsi di Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika yang terjadi secara global. Selanjutnya, di tahun 2025 perekonomian Jawa Barat kembali menguat dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen. Capaian ini lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, dapat diturunkan indikator PDRB per kapita yang menunjukkan rata-rata kontribusi penduduk dalam proses penciptaan nilai tambah bruto. PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 adalah sekitar 45,23 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi sekitar 49,14 juta rupiah di tahun 2022 atau naik sekitar 8,63 persen. Kenaikan ini jauh di atas kenaikan jumlah penduduk, hal ini mengindikasikan mesin ekonomi Provinsi Jawa Barat berputar lebih cepat dari penambahan jumlah penduduk. Selama tiga tahun berikutnya, nilai PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat selalu menunjukkan peningkatan, yakni sebesar 52,65 juta rupiah di 2023, sebesar 56,08 juta rupiah di 2024, dan terus meningkat mencapai 59,86 juta rupiah di 2025.

Nilai PDRB per kapita tersebut adalah nilai yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga nilainya akan sangat dipengaruhi oleh perubahan volume produksi, perubahan harga, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Berkenaan dengan kinerja ekonomi suatu wilayah yang diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil), maka nilai PDRB per kapita pun dapat diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga dapat diamati laju pertumbuhan riilnya.

Periode lima tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB riil Provinsi Jawa Barat menunjukkan pola yang berfluktuasi, sedangkan laju pertumbuhan penduduk cenderung melambat setiap tahunnya. Hal itu menyebabkan laju pertumbuhan PDRB per kapita riil Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu itu juga menunjukkan pola yang dinamis. Pada tahun 2021 PDRB per kapita riil Provinsi Jawa Barat naik sekitar 2,50 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah itu, PDRB per kapita riil naik signifikan sebesar 4,24 persen, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami akselerasi cukup tinggi. Memasuki tahun 2023, PDRB per kapita tumbuh melambat, yaitu sekitar 3,83 persen. Kondisi ini juga sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh melambat di tahun tersebut. Selanjutnya di tahun 2024 terlihat pola yang berbeda, yakni ekonomi Provinsi Jawa Barat tumbuh melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun PDRB per kapita justru memperlihatkan penguatan pertumbuhan, yaitu sebesar 3,94 persen. Pola sejalan antara pertumbuhan PDRB dengan pertumbuhan PDRB per kapita riil kembali terjadi di tahun 2025, yakni pada saat perekonomian Jawa Barat tumbuh

menguat sebesar 5,32 persen, PDRB per kapita riil juga tumbuh menguat sekitar 4,46 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita riil di tahun 2025 adalah yang tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Laju pertumbuhan nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua hal yaitu nilai PDRB yang tercipta dan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berbanding lurus dengan laju pertumbuhan nilai PDRB yang tercipta dan berbanding terbalik dengan laju peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama kurun lima tahun terakhir menunjukkan pola menurun. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 adalah sebesar 1,29 persen, yang tertinggi dalam periode 2021–2025. Hal itu salah satunya merupakan pengaruh dari dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2022, kenaikan jumlah penduduk Jawa Barat melambat yaitu sebesar 1,22 persen. Tren perlambatan laju pertumbuhan jumlah penduduk berlanjut hingga tahun 2025, yakni sebesar 1,18 persen di tahun 2023, sebesar 1,13 persen di tahun 2024, dan sebesar 1,06 persen pada tahun 2025.

4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator perbandingan pengeluaran PDRB untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap ekspor memberikan gambaran mengenai seberapa besar hasil produk wilayah tersebut digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dan digunakan untuk ekspor. Perbandingan antara produk yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor ke luar wilayah, lebih jauh memberikan informasi mengenai rasio antara konsumsi rumah tangga dengan ekspor.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian, perkiraan nilai transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain, dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Sedangkan ekspor adalah barang dan jasa hasil produk wilayah tersebut yang digunakan oleh nonresiden wilayah tersebut.

Perekonomian Jawa Barat dari tahun ke tahun lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 65 persen terhadap PDRB Jawa Barat setiap tahunnya. Dalam periode lima tahun terakhir, nilai konsumsi rumah tangga selalu meningkat setiap tahun. Peningkatan nilai konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain penambahan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, kenaikan harga barang dan jasa, dan peningkatan kualitas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada periode 2021, konsumsi rumah tangga Jawa Barat mencapai nilai 1.424,59 triliun rupiah. Nilai tersebut memberikan peranan sebesar 64,62 persen terhadap PDRB Jawa Barat. Di tahun 2022, nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat meningkat sebesar 145,86 triliun rupiah, yaitu menjadi sebesar 1.570,46 triliun rupiah. Peranan konsumsi rumah tangga di tahun ini pun meningkat menjadi 65,82 persen. Pada periode 2023–2024, berbagai tantangan yang dihadapi baik pada skala global maupun lokal mengakibatkan perekonomian Jawa Barat makin kuat

bergantung pada aktivitas konsumsi masyarakat, terlihat pada kontribusi konsumsi rumah tangga yang meningkat menjadi sebesar 65,81 persen di 2023 dan makin meningkat menjadi 66,00 persen di 2024. Memasuki tahun 2025, nilai konsumsi masyarakat mencapai nilai 1.990,52 triliun rupiah, atau hampir menyentuh angka dua ribu triliun. Namun di tahun ini, kontribusi konsumsi rumah tangga justru menunjukkan penurunan, yaitu menjadi sebesar 65,51 persen, hal itu seiring dengan terjadinya peningkatan peranan pada komponen pengeluaran lain, yaitu ekspor neto.

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan komponen ekspor total Jawa Barat memiliki pola yang sama dengan komponen pengeluaran rumah tangga yakni menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada periode 2021–2022, nilai ekspor total Jawa Barat baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain mengalami peningkatan sebesar 152,70 triliun rupiah, yaitu dari 1.122,99 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 1.275,69 triliun rupiah di tahun 2022. Memasuki tahun 2023, nilai ekspor total Jawa Barat tercatat sebesar 1.458,12 triliun rupiah yang kemudian meningkat menjadi sebesar 1.713,85 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan nilai ekspor total di tahun 2024 adalah yang tertinggi sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, yakni mencapai 255,73 triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai ekspor total pada tahun 2023. Selanjutnya di tahun 2025, nilai ekspor total Jawa Barat tercatat mencapai 1.808,95 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan nilai ekspor total Jawa Barat di tahun 2025 adalah yang terendah, yakni hanya meningkat sebesar 95,10 triliun rupiah. Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang mengalami penurunan permintaan dan pelemahan harga komoditas.

Meskipun dalam rentang lima tahun terakhir terjadi pola yang sama antara nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai ekspor total, rasio keduanya menunjukkan pola yang berbeda. Perbedaan tersebut ditimbulkan oleh perbedaan kenaikan nilai secara relatif pada kedua indikator tersebut.

Tabel 18 memberikan tren perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai ekspor

Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
Ekspor Total (ADHB) (miliar rupiah)	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.122,26	1.713.849,73	1.808.954,71
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,27	1,23	1,18	1,09	1,10

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

total dalam kurun waktu 2021–2025. Nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat di tahun 2021 adalah sebesar 1,27 kali nilai ekspor total. Nilai perbandingan kedua komponen pengeluaran tersebut menunjukkan tren menurun setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat sekitar 1,23 kali nilai ekspor total dan menurun menjadi 1,09 kali pada tahun 2024. Hal itu menunjukkan bahwa penyediaan (supply) barang dan

jasa yang diperuntukkan untuk memenuhi permintaan ekspor meningkat lebih cepat dibandingkan untuk memenuhi permintaan akhir berupa konsumsi akhir rumah tangga. Dengan kata lain, terjadi peningkatan yang lebih besar pada ekspor total Jawa Barat. Kondisi itu dapat pula dimaknai bahwa geliat ekonomi perlahan sudah kembali ke kondisi normal, terlihat pada mulai tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang berorientasi ekspor, baik ekspor luar negeri maupun ekspor ke provinsi luar Jawa Barat. Sedangkan di tahun 2025, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga dengan ekspor hampir menyamai rasio di tahun 2024, yakni hanya berselisih 0,01 poin.

Tren rasio yang makin menurun merupakan indikasi positif bagi perkembangan ekspor Jawa Barat, yaitu perkembangan konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB merupakan rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan investasi fisik secara relatif. Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca ditambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Seperti yang telah diulas pada subbab sebelumnya, pola perkembangan nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2025 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pola serupa pun terjadi pada aktivitas investasi fisik berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, nilai PMTB Jawa Barat tercatat mencapai 545,30 triliun rupiah yang kemudian meningkat menjadi 576,90 triliun rupiah pada tahun 2022. Di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan pada nilai PMTB Jawa Barat, yakni mencapai 644,38 triliun rupiah, atau naik sekitar 11,70 persen. Dua tahun berikutnya, nilai PMTB Jawa Barat meningkat dengan laju yang lebih lambat, yakni mencapai nilai 697,37 triliun rupiah di tahun 2024 dan 743,28 triliun rupiah di tahun 2025.

Membandingkan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai PMTB secara periodik merupakan cara untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika perkembangan penggunaan produk yang tersedia untuk memenuhi kedua komponen pengeluaran tersebut. Rasio yang meningkat bermakna bahwa alokasi penyediaan produk untuk memenuhi konsumsi akhir berupa konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi dari pada peningkatan alokasi untuk memenuhi kegiatan investasi fisik berupa PMTB. Tabel 19 berikut menunjukkan perkembangan rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB Jawa Barat selama periode lima tahun terakhir.

Dalam periode 2021–2025 terlihat bahwa rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai

Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,61	2,72	2,68	2,67	2,68

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

PMTB cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 rasionya adalah sebesar 2,61 yang bermakna bahwa nilai PDRB yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga di tahun 2021 adalah sebanyak 2,61 kali lipat nilai investasi fisik yang dilakukan. Rasio tersebut adalah yang terendah selama periode lima tahun terakhir. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2022, yaitu mencapai 2,72 yang mengindikasikan menguatnya peran konsumsi rumah tangga dalam menggerakkan perekonomian Jawa Barat di tengah perlambatan aktivitas inventasi. Dua tahun berikutnya rasio perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai PMTB menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 2,68 di tahun 2023 dan sebesar 2,67 di tahun 2024. Tentu saja hal itu dipengaruhi oleh makin kuatnya geliat aktivitas investasi di Jawa Barat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun rumah tangga.

Selanjutnya di tahun 2025, rasio perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan PMTB cukup stabil, yaitu sekitar 2,68. Di tahun tersebut perubahan nilai konsumsi rumah tangga cenderung sama dengan perubahan nilai PMTB, yakni nilai konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 6,82 persen dan nilai PMTB meningkat sebesar 6,58 persen. Berdasarkan rangkaian data sejak tahun 2010, rasio nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat terhadap nilai PMTB selalu berada di atas level 2. Hal itu menunjukkan masih sangat dominannya konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Jawa Barat dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya termasuk PMTB. Dengan demikian, apabila terjadi gangguan daya beli masyarakat, akan sangat berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi Jawa Barat. Oleh sebab itu, langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Hal itu sejalan dengan strategi jangka pendek APBN 2025 yang dijalankan oleh Pemerintah RI yang antara lain difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan.

4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir untuk menunjang aktivitas ekonomi di wilayah domestik, yang berasal dari produksi di wilayah domestik dan dari impor. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah. Ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, namun sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya

untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk penambahan aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga, karena pengeluaran dengan jenis tersebut digolongkan ke dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode tertentu. Perbandingan antara nilai konsumsi akhir dengan nilai PDRB menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi akhir pada suatu wilayah. Makin besar nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan makin besar porsi konsumsi akhir dalam perekonomian wilayah tersebut, yang bermakna bahwa makin besar pula ketergantungan perekonomian wilayah tersebut terhadap pengeluaran konsumsi akhir. Sebaliknya, makin kecil rasio menunjukkan makin besar porsi aktivitas investasi dan atau ekspor di wilayah tersebut.

Tabel 20 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, Tabel 20 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah tangga	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
b. LNPRT	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01	20.454,88
c. Pemerintah	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.593,75	145.833,63
Jumlah	1.560.398,08	1.708.528,25	1.878.790,01	2.021.140,76	2.156.804,60
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95
Proporsi (%)	70,78	70,52	71,57	71,58	70,98

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

LNPRT, dan pemerintah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir porsi pengeluaran akhir di dalam PDRB Jawa Barat adalah 71,11 persen, yang memiliki arti bahwa penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai tiga perempat nilai PDRB yang tercipta. Perkembangan porsi konsumsi akhir terhadap PDRB dari tahun 2021 sampai dengan 2025 cenderung berfluktuasi. Pada periode dua tahun pemulihan pasca pandemi Covid-19 yakni tahun 2021 dan 2022, porsi konsumsi akhir di dalam PDRB Jawa Barat cenderung lebih rendah, yaitu berturut-turut sebesar 70,78 dan 70,52. Di masa tersebut peran aktivitas nonproduktif berupa kegiatan konsumsi di dalam perekonomian Jawa Barat cenderung makin kecil, sebaliknya peran aktivitas produktif seperti investasi dan perdagangan dengan luar wilayah baik luar negeri maupun provinsi lain makin membaik. Meningkatnya proporsi PDRB yang digunakan untuk kegiatan produksi memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat sebagai provinsi sentra industri dan penyumbang industri nasional.

Periode 2023 perekonomian global mengalami perlambatan sebagai imbas dari adanya ketegangan politik di beberapa negara, seperti perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan penyerangan Israel terhadap Gaza di Palestina. Hal itu turut mempengaruhi perekonomian

Jawa Barat yang aktivitas produksinya banyak ditujukan untuk ekspor ke luar negeri dan pasokan bahan baku pun banyak yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, paket kebijakan yang diambil pemerintah untuk stabilisasi ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, yang salah satunya berupa kebijakan Penyaluran Bansos untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, cukup ampuh menjaga daya beli domestik. Hal itu memengaruhi perekonomian Jawa Barat sehingga masih tetap tumbuh walaupun melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu pun tercermin pada proporsi konsumsi akhir terhadap nilai PDRB Jawa Barat yang meningkat menjadi 71,57 persen di tahun 2023.

Memasuki tahun 2024, dunia masih berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan beragam. Ketegangan geopolitik antara beberapa negara yang masih berlanjut, disertai oleh adanya pergantian kepemimpinan politik beberapa negara termasuk Indonesia turut mewarnai dinamika pergerakan ekonomi di dalam negeri termasuk Jawa Barat. Di tahun ini Jawa Barat kembali mengalami perlambatan pertumbuhan. Aktivitas konsumsi akhir naik sedikit lebih cepat dari pada kenaikan aktivitas produktif seperti investasi dan ekspor impor, sehingga proporsi konsumsi akhir dalam perekonomian Jawa Barat kembali meningkat tipis menjadi sebesar 71,58 persen di tahun 2024.

Selanjutnya di tahun 2025, peningkatan konsumsi akhir di Jawa Barat tidak secepat peningkatan PDRB yang mengakibatkan rasio perbandingan nilai konsumsi akhir dengan PDRB pun menurun. Tercatat di tahun 2025 rasio konsumsi akhir terhadap PDRB adalah sebesar 70,98 persen.

4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antara residen dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik. Proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan diekspor tentu saja melibatkan kapital di wilayah domestik, baik kapital yang berasal dari dalam wilayah tersebut maupun yang berasal dari impor. Di dalam PDRB, pembentukan kapital tercermin di dalam komponen PMTB. Oleh sebab itu, kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kegiatan PMTB.

Rasio nilai ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran mengenai seberapa besar perbandingan produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah yang digunakan untuk aktivitas ekspor dengan yang ditujukan untuk aktivitas investasi. Jika ratio bernilai lebih dari 1 (satu), maka hal itu menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekspor daripada digunakan untuk investasi. Demikian pula sebaliknya, jika rasionya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah lebih banyak digunakan untuk investasi dari pada untuk ekspor.

Tabel 21 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir (2021–2025) rasio ekspor

Tabel 21 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.122,26	1.713.849,73	1.808.954,71
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2,06	2,21	2,26	2,46	2,43

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

terhadap PMTB Jawa Barat konsisten bernilai di atas 2, yang bermakna bahwa hasil produksi Jawa Barat yang digunakan untuk ekspor lebih besar dari pada untuk kegiatan investasi fisik. Nilai ekspor yang mencapai dua kali lipat nilai PMTB sangat berkaitan erat dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kontribusi perekonomian terbesar pada kategori industri pengolahan. Produk-produk hasil industri pengolahan di Jawa Barat banyak yang berorientasi ekspor ke luar negeri dan juga ke luar daerah.

Pada tahun 2021, rasio ekspor terhadap PMTB yang tercipta adalah sebesar 2,06 yang kemudian meningkat menjadi 2,21 di tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 2,26 di tahun 2023. Pada tahun 2023, meskipun aktivitas ekspor ke luar negeri mengalami penurunan, namun ekspor antar daerah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal itu menunjukkan kemampuan Jawa Barat untuk memenuhi berbagai permintaan yang bukan hanya berasal dari luar negeri namun juga dari provinsi lain.

Selanjutnya di tahun 2024 aktivitas ekspor Jawa Barat menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun di sisi lain kinerja investasi sedikit mengalami perlambatan. Hal itu menyebabkan rasio ekspor Jawa Barat terhadap PMTB naik cukup signifikan mencapai 2,46. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor Jawa Barat yang selalu lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan nilai PMTB setiap tahun dalam periode 2021–2024.

Memasuki tahun 2025, aktivitas ekspor dan investasi Jawa Barat tumbuh melambat, yakni dari 17,54 persen di tahun 2024 menjadi 5,55 persen di tahun 2025. Pada saat yang sama, nilai investasi fisik di Jawa Barat tumbuh sebesar 6,58 persen. Kondisi tersebut berdampak pada rasio nilai ekspor terhadap PMTB yang terkoreksi sedikit turun menjadi 2,43. Daya tarik Jawa Barat bagi investor mendorong peningkatan nilai PMTB dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir realisasi investasi Jawa Barat yang berasal PMA maupun PMDN terus meningkat dan selalu tertinggi secara Nasional. Gairah investasi ini tentu saja diikuti oleh penambahan kapasitas produksi yang selanjutnya meningkatkan produksi barang dan jasa di Jawa Barat, yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jawa Barat sendiri, namun juga untuk memenuhi permintaan dari luar negeri dan luar wilayah.

4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, rasio perbandingan ini menjelaskan tentang ketergantungan Jawa Barat terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah domestik lain baik luar negeri maupun dari provinsi lain. Rasio nilai PDRB terhadap nilai impor berbanding terbalik dengan tingkat ketergantungan tersebut. Artinya, makin kecil rasio menandakan ketergantungan terhadap impor yang makin tinggi, dan sebaliknya makin besar rasio menunjukkan ketergantungan terhadap produk impor yang rendah.

Pada Tabel 22 terlihat bahwa rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat dalam periode 2021–

Tabel 22 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95
Impor Total (ADHB) (miliar rupiah)	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.154,15	1.610.331,45	1.670.850,32
Rasio PDRB terhadap Impor	2,19	2,12	1,93	1,75	1,82

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

2025 menunjukkan pola menurun dan sedikit meningkat di akhir periode. Pada tahun 2021 rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat bernilai sebesar 2,19 dan merupakan yang tertinggi dalam periode 2021–2025. Namun hal itu tidak menggambarkan peningkatan kemampuan Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan domestik. Rendahnya ketergantungan Jawa Barat terhadap impor pada masa itu adalah sebagai akibat dari masih adanya beberapa pembatasan pergerakan manusia termasuk pembatasan aktivitas perdagangan antar negara di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga pemenuhan permintaan domestik lebih banyak berasal dari produk domestik atau dari stok pada periode sebelumnya.

Pada saat situasi ekonomi mulai kembali normal, ketergantungan Jawa Barat terhadap produk impor, baik berupa impor barang konsumsi, barang modal, bahan baku, maupun jasa, terlihat belum berkurang bahkan cenderung makin meningkat. Hal itu terlihat pada menurunnya rasio nilai PDRB terhadap nilai impor Jawa Barat menjadi sebesar 2,12 pada tahun 2022.

Penurunan rasio PDRB terhadap nilai impor Jawa Barat terus berlanjut di dua tahun berikutnya, bahkan sudah menyentuh level 1, yakni sebesar 1,93 di tahun 2023 dan 1,75 di tahun 2024. Hal itu menunjukkan ketergantungan Jawa Barat terhadap barang dan jasa yang berasal dari luar Jawa Barat makin meningkat melebihi kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2025, nilai rasio PDRB terhadap impor total sedikit membaik, yakni sebesar 1,82, namun belum kembali ke level 2 seperti pada periode sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan rasio tersebut sejalan dengan data impor barang luar negeri yang menunjukkan penurunan di tahun 2025.

Penurunan rasio yang secara terus menerus ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan

wilayah Jawa Barat terhadap produk impor yang berdampak terhadap aktivitas produksi domestik. Data impor barang luar negeri Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan penurunan pada impor bahan baku/penolong sebesar 4,92 persen dan impor barang modal menurun sebesar 14,76 persen. Tentu saja hal itu memberikan dampak langsung pada aktivitas produksi di Jawa Barat. Pemerintah dalam hal ini perlu merumuskan kebijakan untuk memajukan industri pengolahan yang berfokus pada substitusi produk-produk impor. Begitu pula dengan perilaku konsumsi masyarakat, harus diupayakan agar masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi produk lokal dari pada produk impor. Harga dan kualitas tentu saja menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan, sehingga hal itu hendaklah menjadi perhatian Pemerintah dan juga produsen. Meskipun data impor barang konsumsi juga menunjukkan penurunan hingga 31,24 persen, masih perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut apakah penurunan tersebut sebagai akibat dari penurunan daya beli masyarakat atau lebih disebabkan karena adanya pengalihan konsumsi masyarakat ke barang-barang domestik.

4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari produksi domestik dan impor, sehingga penyediaan merupakan penjumlahan *output* domestik dengan impor. Dengan membandingkan nilai penyediaan domestik dengan permintaan dan nilai impor dengan permintaan, akan diperoleh suatu rasio yang dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah pada produk yang berasal dari impor. Dengan kata lain, ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23 menunjukkan bahwa pada periode lima tahun terakhir tendensi permintaan terus

Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Total PDRB ADHB (miliar rupiah)	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95
%	68,61	67,99	65,90	63,68	64,52
Nilai Impor Total ADHB (miliar rupiah)	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.154,15	1.610.331,45	1.670.850,32
%	31,39	32,01	34,10	36,32	35,48
Permintaan Total (miliar rupiah)	3.213.532,57	3.563.601,30	3.983.352,78	4.433.783,24	4.709.518,27
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021 permintaan Jawa Barat terhadap barang dan jasa adalah sebesar 3.213,53 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2022 terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi sebesar 3.563,60 triliun rupiah seiring dengan kembali normalnya kondisi perekonomian.

Memasuki tahun 2023, dunia masih menghadapi ketidakpastian yang mengakibatkan

perlambatan kinerja ekonomi global. Hal itu tentu saja menjadi suatu ancaman bagi perekonomian di dalam negeri, termasuk Jawa Barat. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mengeluarkan tiga paket kebijakan untuk melindungi stabilitas ekonomi pada akhir 2023 lalu. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui Kebijakan Penebalan Bansos, memperkuat UMKM melalui Kebijakan Percepatan Penyaluran Program KUR, dan meningkatkan keterjangkauan hunian melalui Kebijakan Penguatan Sektor Perumahan. Paket kebijakan Pemerintah Pusat tersebut bersama-sama dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah berpengaruh pada peningkatan permintaan barang dan jasa Jawa Barat selama tahun 2023. Tercatat permintaan Jawa Barat sepanjang 2023 mencapai 3.983,35 triliun rupiah atau naik sekitar 419,75 triliun rupiah jika dibandingkan dengan permintaan di tahun sebelumnya.

Dua tahun berikutnya, permintaan total Jawa Barat masih meningkat yakni menjadi sebesar 4.433,78 triliun rupiah di tahun 2024 dan mencapai 4.709,52 triliun rupiah di tahun 2025. Peningkatan nilai permintaan di tahun 2024 adalah yang tertinggi, yakni sebesar 450,43 triliun rupiah. Di tahun tersebut kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, serta perlindungan bagi sektor industri padat karya dan UMKM. Paket kebijakan yang diambil antara lain berupa bantuan sosial tambahan, bantuan pangan, subsidi transportasi, insentif pajak bagi UMKM, dan bantuan subsidi upah. Sedangkan di tahun 2025, kebijakan ekonomi strategis pemerintah difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan program prioritas. Di tahun ini pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi antara lain berupa program pemagangan bagi lulusan baru, koperasi desa merah putih, insentif pajak dan fiskal, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk memenuhi permintaan, sebagian barang dan jasa harus didatangkan dari luar wilayah, baik dari luar negeri maupun dari provinsi lain. Sepanjang periode 2021–2025, pemenuhan permintaan Jawa Barat yang berasal dari impor berkisar antara 31 sampai dengan 36 persen dari nilai permintaan total. Persentase terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 31,39 persen, dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,32 persen. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk telah normalnya kembali kegiatan ibadah umrah dan haji. Hal itu tentu saja memberikan dampak pada peningkatan impor jasa. Sedangkan di tahun 2025, persentase nilai impor terhadap permintaan total Jawa Barat sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai impor total Jawa Barat di tahun 2025 setara dengan 35,48 persen permintaan total. Hal ini mengindikasikan naiknya peran barang dan jasa domestik dalam memenuhi permintaan Jawa Barat.

4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi valuta yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat (nonresiden) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut dengan ekspor neto. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor maka terjadi defisit. Dilihat dari sisi arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran valuta masuk, sebaliknya jika dalam posisi defisit maka terjadi aliran valuta keluar. Dalam hal ini kekuatan ekonomi suatu wilayah antara lain ditentukan oleh proses tersebut.

Selain berdasarkan gambaran posisi neraca perdagangan, kekuatan ekonomi dapat juga dinilai berdasarkan perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 24 menunjukkan neraca perdagangan Jawa Barat periode 2021–2025. Pada tabel

Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (X) (ADHB) (miliar rupiah)	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.122,26	1.713.849,73	1.808.954,71
Nilai Impor (M) (ADHB) (miliar rupiah)	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.154,15	1.610.331,45	1.670.850,32
Net Ekspor (X – M) (miliar rupiah)	114.115,71	134.866,50	99.968,11	103.518,28	138.104,39
Rasio ekspor terhadap Impor	1,113	1,118	1,074	1,064	1,083

Catatan: *angka sementara

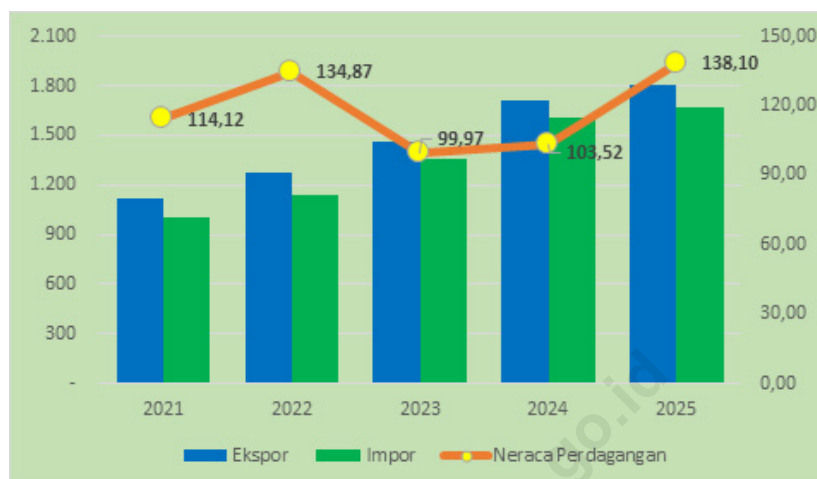
**angka sangat sementara

tersebut terlihat bahwa posisi neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan dengan provinsi lain selalu bernilai positif, artinya perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat selalu berada dalam posisi surplus dalam lima tahun terakhir. Surplus terjadi karena aliran dana yang masuk, baik dari luar negeri dalam bentuk valuta maupun dari luar provinsi, lebih banyak dari pada aliran dana yang keluar dari Provinsi Jawa Barat.

Nilai surplus perdagangan Jawa Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 114,12 triliun rupiah yang berarti aliran valuta yang masuk lebih besar dari pada aliran valuta yang keluar dari Jawa Barat. Posisi surplus tersebut meningkat di tahun 2022 yakni mencapai 134,87 triliun rupiah atau meningkat sekitar 18,18 persen dari nilai surplus yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2023, surplus yang dihasilkan oleh neraca perdagangan Jawa Barat mengalami penurunan sekitar 25,88 persen. Surplus perdagangan Jawa Barat di tahun 2023 tercatat sebesar 99,97 triliun rupiah. Setahun kemudian, neraca perdagangan Jawa Barat masih mengalami surplus senilai 103,52 triliun rupiah. Meskipun meningkat dibanding tahun sebelumnya, nilai surplus ini masih

lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai surplus perdagangan yang dicapai pada tahun 2021 dan 2022. Memasuki tahun 2025, neraca perdagangan Jawa Barat menunjukkan performa yang sangat baik. Nilai surplus perdagangan mencapai 138,10 triliun rupiah atau tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Hal itu sebagai dampak dari kenaikan nilai impor Jawa Barat tidak secepat kenaikan nilai ekspor. Kondisi neraca perdagangan Jawa Barat selama periode 2021–2025 secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.

Selanjutnya, pengamatan terhadap neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengamati



Gambar 2 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

nilai rasio ekspor terhadap impor pada setiap tahun. Tabel 24 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat selalu berada di atas angka 1 (satu), yang bermakna bahwa nilai ekspor pada periode tersebut lebih tinggi dari pada nilai impor. Rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 1,118 yang bermakna bahwa nilai ekspor Jawa Barat di tahun tersebut lebih tinggi sekitar 11,82 persen dari pada nilai impor Jawa Barat di tahun tersebut. Hal itu tentu saja merupakan capaian positif dalam perputaran perekonomian Jawa Barat. Nilai rasio ekspor terhadap impor tertinggi kedua dalam kurun lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yakni mencapai 1,113. Dua tahun berikutnya yakni 2023 dan 2024, rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat berturut-turut sebesar 1,074 dan 1,064. Meskipun masih berada di atas angka 1, rasio ekspor Jawa Barat terhadap impor menunjukkan pola penurunan. Hal itu terjadi karena peningkatan nilai impor yang lebih cepat daripada peningkatan nilai ekspor.

Memasuki tahun 2025, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kenaikan ekspor Jawa Barat lebih tinggi dari pada kenaikan nilai impor. Hal ini menyebabkan rasio yang tercipta sedikit menguat yakni menjadi sebesar 1,083. Meskipun demikian, rasio ini masih lebih rendah dari pada capaian 5 tahun sebelumnya. Dalam hal ini, perhatian pemerintah dan pelaku usaha diperlukan guna menjaga agar pola penurunan tidak terus berlanjut, atau bahkan turun ke level di bawah angka 1 di tahun-tahun mendatang.

4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan 1 ($-1 < \text{RPI} < 1$). Jika RPI bernilai di antara nol dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara nol dan positif 1, maka perdagangan internasional wilayah tersebut didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25 menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Provinsi Jawa Barat

Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (miliar rupiah)	488.180,25	577.852,16	563.498,71	608.006,76	645.416,47
Nilai Impor LN, ADHB (M) (miliar rupiah)	199.808,17	242.819,21	211.430,71	237.095,14	220.740,58
X-M (miliar rupiah)	288.372,08	335.032,95	352.068,01	370.911,62	424.675,89
X+M (miliar rupiah)	687.988,42	820.671,36	774.929,42	845.101,89	866.157,05
Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	0,42	0,41	0,45	0,44	0,49

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

periode 2021–2025. Pada periode tersebut, posisi ekspor luar negeri Jawa Barat selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan pola yang hampir sama setiap tahunnya. Nilai ekspor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2021 tercatat sekitar 488,18 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi sebesar 577,85 triliun rupiah di tahun 2022. Capaian nilai ekspor luar negeri di dua tahun tersebut sudah melampaui nilai ekspor luar negeri sebelum masa pandemi. Memasuki tahun 2023, kondisi global yang masih belum menentu akibat adanya konflik beberapa negara, kelangkaan energi, dan naiknya harga komoditas, menyebabkan nilai ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami penurunan, yakni menjadi sebesar 563,50 triliun rupiah. Selanjutnya di tahun 2024, nilai ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 44,51 triliun rupiah sehingga mencapai 608,01 triliun rupiah. Selanjutnya di tahun 2025, meskipun ketegangan politik beberapa negara masih mempengaruhi situasi global dan adanya isu kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, nilai ekspor Jawa Barat ke luar negeri masih mampu tumbuh mencapai 645,42 triliun rupiah. Nilai ekspor ke luar negeri di tahun ini adalah yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Perkembangan nilai impor luar negeri Jawa Barat memiliki pola yang sedikit berbeda dengan dinamika nilai ekspor luar negerinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai impor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 199,81 triliun rupiah, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi sekitar 242,82 triliun rupiah di tahun 2022. Nilai impor luar negeri Jawa Barat di tahun 2022 adalah yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Memasuki tahun 2023, nilai impor luar negeri Jawa Barat berkontraksi cukup dalam yakni

hanya sebesar 211,43 triliun rupiah. Nilai ini turun sekitar 12,93 persen dibandingkan dengan nilai impor luar negeri di tahun sebelumnya. Pola ini sama dengan yang terjadi pada aktivitas ekspor luar negeri. Selanjutnya di 2024, impor luar negeri Jawa Barat menguat sebesar 12,14 persen sehingga mencatat nilai sebesar 237,10 triliun rupiah. Meskipun secara persentase penguatan nilai impor jauh lebih tinggi dari pada penguatan nilai ekspor, namun nilai impor luar negeri yang tercipta masih lebih rendah dari pada capaian di tahun 2022. Pola yang berbeda terjadi di tahun 2025, yakni pada saat nilai ekspor luar negeri Jawa Barat meningkat sebesar 6,15 persen, nilai impor luar negeri justru kembali berkontraksi sebesar 6,90 persen. Nilai impor luar negeri Jawa Barat di tahun 2025 tercatat sebesar 220,74 triliun rupiah atau hanya lebih tinggi 20,93 triliun rupiah dibanding nilai impor luar negeri di tahun 2021.

Dinamika nilai ekspor dan impor luar negeri menghasilkan suatu pola Rasio Perdagangan Internasional (RPI) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25. Selama periode 2021–2025 terlihat bahwa RPI Jawa Barat bernilai positif setiap tahunnya dan cenderung berfluktuasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai RPI yang berada di antara nol dan positif 1 memiliki makna bahwa perdagangan internasional Jawa Barat selama kurun waktu tersebut didominasi oleh kegiatan ekspor. Pada periode lima tahun terakhir, nilai RPI Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu mencapai 0,49 dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai RPI sebesar 0,41. Peningkatan nilai RPI mengandung makna bahwa kenaikan nilai impor luar negeri berada di bawah kenaikan nilai ekspor luar negeri, dan sebaliknya penurunan nilai RPI mengandung arti bahwa kenaikan impor luar negeri lebih tinggi dari pada kenaikan nilai ekspor luar negeri.

Nilai RPI Jawa Barat berfluktuasi sepanjang periode 2021–2025 dengan kecenderungan makin meningkat. Nilai RPI di tahun 2022 lebih rendah 0,01 poin jika dibandingkan dengan nilai RPI di tahun 2021 yakni menurun dari sebesar 0,42 di tahun 2021 menjadi 0,41 di tahun 2022. Nilai RPI Jawa Barat kembali meningkat 0,04 poin di tahun 2023, sehingga mencapai posisi 0,45. Pada tahun tersebut baik nilai ekspor luar negeri maupun nilai impor luar negeri mengalami penurunan. Kenaikan nilai RPI di tahun 2023 menandakan bahwa penurunan nilai impor luar negeri lebih besar dari pada penurunan yang terjadi pada nilai ekspor luar negeri. Selanjutnya di tahun 2024, nilai RPI Jawa Barat menurun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan nilai RPI tahun 2023, yaitu sebesar 0,44. Meskipun sedikit menurun, nilai RPI Jawa Barat di tahun 2024 masih lebih tinggi dari pada nilai RPI di masa awal pemulihan pasca pandemi Covid-19. Seperti telah disinggung sebelumnya, pada tahun 2024 nilai ekspor luar negeri dan impor luar negeri Jawa Barat mengalami peningkatan. Nilai ekspor luar negeri meningkat sekitar 7,90 persen, sedangkan nilai impor luar negeri meningkat lebih tinggi yakni sebesar 12,14 persen. Peningkatan nilai impor luar negeri yang lebih cepat dari pada peningkatan ekspor luar negeri itulah yang menyebabkan nilai RPI Jawa Barat sedikit menurun di tahun 2024.

Di penghujung periode lima tahun terakhir, nilai ekspor luar negeri Jawa barat menunjukkan peningkatan pada saat nilai impor luar negerinya mengalami kontraksi. Hal itu menyebabkan nilai RPI Jawa Barat di tahun 2025 meningkat hingga 0,05 poin atau mencapai 0,49. Nilai RPI di tahun ini adalah yang tertinggi selama periode 2021–2025.

PENUTUP

<https://jabar.bps.go.id>

BAB

5

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di tingkat regional (provinsi) pada suatu periode dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten dan memiliki keterbandingan secara wilayah.
2. PDRB menurut pengeluaran tahun 2021–2025 menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
3. Data disajikan dalam bentuk series tahun 2021–2025, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain dan model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (*industry*), Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan neraca perdagangan. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).
6. Penyajian Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2025 menggunakan data-data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional, dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
7. Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,32 persen. Angka tersebut menunjukkan akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,95 persen. Berdasarkan komponen pengeluaran, kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), serta ekspor barang dan jasa. Penyajian Publikasi PDRB Tahun 2025 ditujukan dalam konteks akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang dipengaruhi oleh kondisi domestik yang relatif kondusif. Kombinasi konsumsi domestik yang kuat, peningkatan belanja pemerintah, pertumbuhan investasi, serta stabilitas ekonomi makro menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja ekonomi. Sinergi berbagai faktor pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Pedoman Penyusunan PDRB Kab/Kota Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Tim Penerjemah SNA 2008 Badan Pusat Statistik. 2008. Sistem Neraca Nasional 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- United Nations. 2009. System of National Accounts 2008 (2008 SNA). New York: United Nations.

<https://jabar.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jabar.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah),
2021-2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.863.403,00	1.990.516,09
a Makanan, Minuman dan Rokok	645.351,21	722.110,56	794.627,04	861.487,93	916.904,17
b Pakaian dan Alas Kaki	53.220,93	56.014,94	59.533,49	62.301,67	65.643,56
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	147.511,90	158.992,79	170.923,71	179.716,39	186.715,90
d Kesehatan dan Pendidikan	85.359,93	90.498,41	96.982,57	102.784,38	110.451,42
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	334.383,99	370.990,45	417.938,68	450.452,71	478.441,60
f Hotel dan Restoran	82.993,60	90.628,41	99.625,41	109.208,42	119.189,06
g Lainnya	75.772,53	81.222,46	88.086,07	97.451,51	113.170,37
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01	20.454,88
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.593,75	145.833,63
a Konsumsi Kolektif	66.564,86	66.901,98	74.677,46	78.655,53	74.032,31
b Konsumsi Individu	55.478,20	56.448,25	58.949,53	59.938,22	71.801,32
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70	743.275,41
a Bangunan	436.960,10	452.921,79	498.215,80	537.204,57	571.480,84
b Non-Bangunan	108.337,54	123.973,46	146.163,66	160.165,13	171.794,57
5 Perubahan Inventori	-15.151,20	2.492,32	2.061,05	1.423,05	483,55
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	488.180,25	577.852,16	563.498,71	608.006,76	645.416,47
a. Barang	483.922,22	572.741,59	557.550,06	600.551,37	637.087,09
b. Jasa	4.258,02	5.110,56	5.948,65	7.455,38	8.329,38
7 Impor Luar Negeri [a+b]	199.808,17	242.819,21	211.430,71	237.095,14	220.740,58
a. Barang	181.634,13	218.696,34	184.106,69	205.722,72	189.772,29
b. Jasa	18.174,04	24.122,87	27.324,01	31.372,41	30.968,29
8 Net Ekspor Antar Daerah [a+b]	-174.256,37	-200.166,45	-252.099,90	-267.393,34	-286.571,51
a. Ekspor	634.807,80	697.833,32	894.623,55	1.105.842,97	1.163.538,24
b. Impor	809.064,17	897.999,77	1.146.723,45	1.373.236,31	1.450.109,74
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.198,63	2.823.451,79	3.038.667,95

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut
Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2021-2025**

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	905.974,62	948.326,48	998.976,60	1.048.976,70	1.101.044,65
a Makanan, Minuman dan Rokok	355.651,32	371.401,88	388.606,11	404.023,83	419.554,12
b Pakaian dan Alas Kaki	39.451,53	40.810,28	42.425,43	43.766,18	45.643,04
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	102.116,00	106.309,92	111.517,58	116.714,40	122.419,25
d Kesehatan dan Pendidikan	60.816,95	62.744,43	65.341,20	67.621,32	71.363,54
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	238.521,07	253.710,22	271.599,30	290.149,05	307.372,57
f Hotel dan Restoran	60.490,28	63.522,52	67.394,60	72.073,05	77.313,64
g Lainnya	48.927,46	49.827,23	52.092,39	54.628,87	57.378,50
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	9.144,60	9.430,85	10.752,89	11.601,21	12.203,69
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	73.136,39	71.969,80	76.081,30	77.136,19	80.548,60
a Konsumsi Kolektif	39.706,34	38.950,35	42.435,82	43.753,88	40.883,73
b Konsumsi Individu	33.430,05	33.019,45	33.645,48	33.382,32	39.664,87
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87	435.547,55
a Bangunan	289.078,29	283.279,75	300.865,00	322.129,98	339.441,31
b Non-Bangunan	68.899,59	75.726,35	85.886,78	91.531,89	96.106,24
5 Perubahan Inventori	-8.456,84	1.390,51	1.117,33	750,32	244,45
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	318.560,08	357.666,54	346.134,30	364.947,14	370.842,79
a. Barang	316.221,03	354.977,63	343.120,87	361.252,11	366.785,13
b. Jasa	2.339,05	2.688,91	3.013,43	3.695,04	4.057,66
7 Impor Luar Negeri [a+b]	141.550,81	161.581,71	140.131,31	156.143,28	142.037,59
a. Barang	131.771,79	149.304,99	126.729,49	141.118,18	127.451,59
b. Jasa	9.779,01	12.276,72	13.401,82	15.025,10	14.586,00
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	-7.039,52	3.776,36	-10.276,53	-8.805,96	-13.077,41
a. Ekspor	362.756,13	398.786,08	504.340,56	588.530,30	605.981,26
b. Impor	369.795,66	395.009,72	514.617,09	597.336,26	619.058,67
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.406,36	1.752.124,20	1.845.316,74

Catatan: *angka sementara
**angka sangat sementara

Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,62	64,82	65,81	66,00	65,51
a Makanan, Minuman dan Rokok	29,27	29,81	30,27	30,51	30,17
b Pakaian dan Alas Kaki	2,41	2,31	2,27	2,21	2,16
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,69	6,56	6,51	6,37	6,14
d Kesehatan dan Pendidikan	3,87	3,74	3,69	3,64	3,63
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15,17	15,31	15,92	15,95	15,75
f Hotel dan Restoran	3,76	3,74	3,79	3,87	3,92
g Lainnya	3,44	3,35	3,36	3,45	3,72
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,61	0,66	0,68	0,67
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	5,54	5,09	5,09	4,91	4,80
a Konsumsi Kolektif	3,02	2,76	2,84	2,79	2,44
b Konsumsi Individu	2,52	2,33	2,25	2,12	2,36
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	24,73	23,81	24,55	24,70	24,46
a Bangunan	19,82	18,69	18,98	19,03	18,81
b Non-Bangunan	4,91	5,12	5,57	5,67	5,65
5 Perubahan Inventori	-0,69	0,10	0,08	0,05	0,02
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	22,14	23,85	21,46	21,53	21,24
a. Barang	21,95	23,64	21,24	21,27	20,97
b. Jasa	0,19	0,21	0,23	0,26	0,27
7 Impor Luar Negeri [a+b]	9,06	10,02	8,05	8,40	7,26
a. Barang	8,24	9,03	7,01	7,29	6,25
b. Jasa	0,82	1,00	1,04	1,11	1,02
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	-7,90	-8,26	-9,60	-9,47	-9,43
a. Ekspor	28,79	28,80	34,08	39,17	38,29
b. Impor	36,70	37,06	43,68	48,64	47,72
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Lampiran 4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,09	59,64	59,84	59,87	59,67
a Makanan, Minuman dan Rokok	23,59	23,36	23,28	23,06	22,74
b Pakaian dan Alas Kaki	2,62	2,57	2,54	2,50	2,47
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,77	6,69	6,68	6,66	6,63
d Kesehatan dan Pendidikan	4,03	3,95	3,91	3,86	3,87
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15,82	15,96	16,27	16,56	16,66
f Hotel dan Restoran	4,01	4,00	4,04	4,11	4,19
g Lainnya	3,25	3,13	3,12	3,12	3,11
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,61	0,59	0,64	0,66	0,66
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	4,85	4,53	4,56	4,40	4,37
a Konsumsi Kolektif	2,63	2,45	2,54	2,50	2,22
b Konsumsi Individu	2,22	2,08	2,02	1,91	2,15
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	23,74	22,58	23,17	23,61	23,60
a Bangunan	19,17	17,82	18,02	18,39	18,39
b Non-Bangunan	4,57	4,76	5,14	5,22	5,21
5 Perubahan Inventori	-0,56	0,09	0,07	0,04	0,01
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	21,13	22,49	20,73	20,83	20,10
a. Barang	20,97	22,33	20,55	20,62	19,88
b. Jasa	0,16	0,17	0,18	0,21	0,22
7 Impor Luar Negeri [a+b]	9,39	10,16	8,39	8,91	7,70
a. Barang	8,74	9,39	7,59	8,05	6,91
b. Jasa	0,65	0,77	0,80	0,86	0,79
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	-0,47	0,24	-0,62	-0,50	-0,71
a. Ekspor	24,06	25,08	30,21	33,59	32,84
b. Impor	24,53	24,84	30,83	34,09	33,55
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,31	10,24	10,01	7,45	6,82
a Makanan, Minuman dan Rokok	4,37	11,89	10,04	8,41	6,43
b Pakaian dan Alas Kaki	1,77	5,25	6,28	4,65	5,36
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,19	7,78	7,50	5,14	3,89
d Kesehatan dan Pendidikan	4,76	6,02	7,16	5,98	7,46
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3,02	10,95	12,65	7,78	6,21
f Hotel dan Restoran	2,57	9,20	9,93	9,62	9,14
g Lainnya	2,26	7,19	8,45	10,63	16,13
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,15	6,97	18,52	9,73	6,85
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	4,61	1,07	8,33	3,72	5,22
a Konsumsi Kolektif	-4,27	0,51	11,62	5,33	-5,88
b Konsumsi Individu	17,71	1,75	4,43	1,68	19,79
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	11,47	5,79	11,70	8,22	6,58
a Bangunan	11,23	3,65	10,00	7,83	6,38
b Non-Bangunan	12,46	14,43	17,90	9,58	7,26
5 Perubahan Inventori	-155,49	116,45	-17,30	-30,96	-66,02
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	24,42	18,37	-2,48	7,90	6,15
a. Barang	25,24	18,35	-2,65	7,71	6,08
b. Jasa	-28,69	20,02	16,40	25,33	11,72
7 Impor Luar Negeri [a+b]	21,97	21,53	-12,93	12,14	-6,90
a. Barang	29,12	20,40	-15,82	11,74	-7,75
b. Jasa	-21,48	32,73	13,27	14,82	-1,29
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	-1,41	-14,87	-25,95	-6,07	-7,17
a. Ekspor	21,60	9,93	28,20	23,61	5,22
b. Impor	16,60	10,99	27,70	19,75	5,60
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	5,89	9,89	8,35	7,55	7,62

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025**

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,33	4,67	5,34	5,01	4,96
a Makanan, Minuman dan Rokok	2,14	4,43	4,63	3,97	3,84
b Pakaian dan Alas Kaki	0,55	3,44	3,96	3,16	4,29
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,79	4,11	4,90	4,66	4,89
d Kesehatan dan Pendidikan	4,62	3,17	4,14	3,49	5,53
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	0,80	6,37	7,05	6,83	5,94
f Hotel dan Restoran	0,71	5,01	6,10	6,94	7,27
g Lainnya	0,01	1,84	4,55	4,87	5,03
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,92	3,13	14,02	7,89	5,19
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	2,41	-1,60	5,71	1,39	4,42
a Konsumsi Kolektif	-6,75	-1,90	8,95	3,11	-6,56
b Konsumsi Individu	15,94	-1,23	1,90	-0,78	18,82
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	6,47	0,29	7,73	6,96	5,29
a Bangunan	5,84	-2,01	6,21	7,07	5,37
b Non-Bangunan	9,22	9,91	13,42	6,57	5,00
5 Perubahan Inventori	-152,21	116,44	-19,65	-32,85	-67,42
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	21,48	12,28	-3,22	5,44	1,62
a. Barang	22,14	12,26	-3,34	5,28	1,53
b. Jasa	-29,81	14,96	12,07	22,62	9,81
7 Impor Luar Negeri [a+b]	22,83	14,15	-13,28	11,43	-9,03
a. Barang	28,13	13,31	-15,12	11,35	-9,68
b. Jasa	-21,18	25,54	9,16	12,11	-2,92
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	65,70	153,65	-372,13	14,31	-48,51
a. Ekspor	22,35	9,93	26,47	16,69	2,97
b. Impor	16,65	6,82	30,28	16,07	3,64
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	3,74	5,45	5,00	4,95	5,32

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 7 Perkembangan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut
Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2021–2025**

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	157,24	165,60	172,95	177,64	180,78
a Makanan, Minuman dan Rokok	181,46	194,43	204,48	213,23	218,54
b Pakaian dan Alas Kaki	134,90	137,26	140,33	142,35	143,82
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	144,46	149,56	153,27	153,98	152,52
d Kesehatan dan Pendidikan	140,36	144,23	148,42	152,00	154,77
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	140,19	146,23	153,88	155,25	155,66
f Hotel dan Restoran	137,20	142,67	147,82	151,52	154,16
g Lainnya	154,87	163,01	169,10	178,39	197,23
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	150,48	156,08	162,25	165,02	167,61
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	166,87	171,39	175,64	179,67	181,05
a Konsumsi Kolektif	167,64	171,76	175,98	179,77	181,08
b Konsumsi Individu	165,95	170,95	175,21	179,55	181,02
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	152,33	160,69	166,61	168,58	170,65
a Bangunan	151,16	159,88	165,59	166,77	168,36
b Non-Bangunan	157,24	163,71	170,18	174,98	178,75
5 Perubahan Inventori	179,16	179,24	184,46	189,66	197,81
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	153,25	161,56	162,80	166,60	174,04
a. Barang	153,03	161,35	162,49	166,24	173,69
b. Jasa	182,04	190,06	197,40	201,77	205,28
7 Impor Luar Negeri [a+b]	141,16	150,28	150,88	151,84	155,41
a. Barang	137,84	146,48	145,28	145,78	148,90
b. Jasa	185,85	196,49	203,88	208,80	212,32
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	2.475,40	-5.300,51	2.453,16	3.036,51	2.191,35
a. Ekspor	175,00	174,99	177,38	187,90	192,01
b. Impor	218,79	227,34	222,83	229,89	234,24
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	146,22	152,38	157,25	161,14	164,67

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

**Lampiran 8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100
Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025**

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,96	5,32	4,44	2,71	1,77
a Makanan, Minuman dan Rokok	2,19	7,15	5,17	4,28	2,49
b Pakaian dan Alas Kaki	1,22	1,75	2,24	1,44	1,03
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,98	3,53	2,48	0,46	-0,95
d Kesehatan dan Pendidikan	0,14	2,76	2,91	2,41	1,82
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2,21	4,31	5,23	0,89	0,26
f Hotel dan Restoran	1,85	3,99	3,61	2,50	1,74
g Lainnya	2,25	5,26	3,73	5,50	10,56
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,20	3,72	3,95	1,71	1,57
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah [a+b]	2,15	2,71	2,48	2,30	0,77
a Konsumsi Kolektif	2,66	2,46	2,45	2,15	0,73
b Konsumsi Individu	1,53	3,01	2,49	2,48	0,82
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto [a+b]	4,69	5,49	3,68	1,18	1,23
a Bangunan	5,09	5,77	3,57	0,71	0,96
b Non-Bangunan	2,97	4,12	3,95	2,82	2,16
5 Perubahan Inventori	6,29	0,04	2,91	2,82	4,30
6 Ekspor Luar Negeri [a+b]	2,42	5,43	0,77	2,34	4,47
a. Barang	2,54	5,43	0,71	2,31	4,48
b. Jasa	1,60	4,41	3,86	2,21	1,74
7 Impor Luar Negeri [a+b]	-0,70	6,46	0,40	0,64	2,35
a. Barang	0,77	6,27	-0,82	0,35	2,14
b. Jasa	-0,38	5,73	3,76	2,41	1,68
8 Net Ekspor Antar Daerah [a-b]	195,62	-314,13	-146,28	23,78	-27,83
a. Ekspor	-0,62	-0,00	1,37	5,93	2,19
b. Impor	-0,05	3,91	-1,98	3,17	1,89
PDRB [1+2+3+4+5+6+7+8]	2,07	4,21	3,20	2,47	2,19

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustafa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp. (022) 7272595; (022) 7201696; Faks.: (022) 7213572
E-Mail : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

